



KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2025 - 2029**



DINAS KESEHATAN



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 155.9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
3. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam

- lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan orientasi penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029;
 - b. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra;
 - c. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
 - d. merumuskan rancangan awal renstra;
 - e. menyusun rancangan awal renstra;
 - f. melaksanakan pembahasan rancangan awal renstra melalui Forum Perangkat Daerah;
 - g. melakukan penyempurnaan rancangan awal renstra berdasarkan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah menjadi rancangan renstra Perangkat Daerah;
 - h. menyampaikan rancangan renstra kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi;
 - i. dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 17 Juni 2025

WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. M. NURSIAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 155.a. TAHUN 2025

TANGGAL : 17 JUNI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KESEHATAN TAHUN 2025-2029.

DAFTAR NAMA PERSONALIA TIM:

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Samsul Rizal, ST/Perencana	Sekretaris
4.	Kasubbag.Perencanaan dan keuangan	Koordinator Sekretariat Dinas
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Budi Setiawan / Perencana	Anggota
7.	Muhammad Tohri / Perencana	Anggota
8.	Rians Kamiswara / Perencana	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat
10.	Subkoor.Kesehatan Keluarga	Anggota
11.	Subkoor.Gizi	Anggota
12.	Subkoor.Promosi Kesehatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	Koordinator Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
14.	Subkoor.Pengendalian Penyakit	Anggota
15.	Subkoor.Surveilans	Anggota
16.	Subkoor.Kesehatan Lingkungan	Anggota
17.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Bidang Sumber Daya Kesehatan
18.	Subkoor.Farmasi	Anggota
19.	Subkoor.Sitem Informasi dan Penelitian dan Prngembangan Kesehatan	Anggota
20.	Subkoor.Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
21.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
22.	Subkoor.Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Anggota
23.	Subkor.Mutu dan JKN	Anggota

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
24.	Subkooor.Rujukan	Anggota
25.	Kepala UPTD BLUD Labkesda. dan Unit Transfusi Darah	Koordinator UPTD BLUD Labkesda dan UTD
26.	KTU BLUD Labkesda. dan UTD	Anggota
27.	Direktur UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya	Koordinator UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya
28.	Kasubbag.Program UPTD BLUD RSUD Praya	Koordinator Program
29.	Siti Nuryuliani/Perencana UPTD BLUD RSUD Praya	Anggota
30.	KTU UPTD BLUD RSUD Praya	Koordinator Tata Usaha
31.	Kabid Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya UPTD BLUD RSUD Praya	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya
32.	Kabid Pelayanan UPTD BLUD RSUD Praya	Koordinator Bidang Pelayanan
33.	Kepala UPTD BLUD Puskesmas se-Kab.Lombok Tengah	Koordinator UPTD BLUD Puskesmas masing-masing Puskesmas
34.	Bendahara Pembantu UPTD BLUD Puskesmas se- Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. M. NURSI AH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (INMEN) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah merupakan acuan dan panduan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah juga menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang disusun setiap tahun sehingga pelaksanaan kinerja tahunan menjadi lebih terarah dan terjaga kontinuitasnya. Dengan demikian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra juga disusun sebagai media informasi publik dan memberikan gambaran penjabaran perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, yaitu penjabaran dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 ini masih belum sempurna, untuk itu saran, kritik dan masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran, masukan dan kiritk akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dimasa mendatang. Besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik

sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 7 Nopember 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah



[Handwritten signature]
Dr. H. SUARDI, SKM., MPH
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 197212311995031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	50
A. Tujuan Dan Sasaran Restra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.....	50
B. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
A. Uraian Program.....	66
B. Uraian Kegiatan.....	72
C. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	78
D. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	93
E. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	96
BAB V PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024 .	24
Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel 2. 3 Kelompok Sasaran Layanan.....	41
Tabel 2. 4 Mitra Perangkat Daerah.....	42
Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
Tabel 2. 6 Isu Strategis Perangkat Daerah	48
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2030	51
Tabel 3. 2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan	53
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan RPMJD terkait Kesehatan	55
Tabel 4. 1 Program Dinas Kesehatan Tahun 2026-2030	67
Tabel 4. 2 Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029	74
Tabel 4. 3 Uraian Subkegiatan , Indikator dan Pagu Indikatif Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Daerah	79
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan	93
Tabel 4. 5 Definisi Operasional dan Perhitungan Pencapaian IKU	94
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Tahun 2025- 2029	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2024.....	27
Grafik 2. 2 Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024	29
Grafik 2. 3 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2020-2024	30
Grafik 2. 4 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tahun 2020-2024	31
Grafik 2. 5 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2020-2024	32
Grafik 2. 6 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Tahun 2020- 2024	32
Grafik 2. 7 Pelayanan Pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2020-2024	34
Grafik 2. 8 Penemuan Kasus Positif TB Tahun 2020-2024.....	34
Grafik 2. 9 Pelayanan Pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2020-2024	35
Grafik 2. 10 Penemuan Kasus Positif HIV Tahun 2020-2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	15
Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaiannya	16
Gambar 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Kondisi pembangunan kesehatan diharapkan dapat ditransformasi melalui program-program seperti memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil, anak balita dan peserta didik di sekolah dan pesantren, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, membangun rumah sakit berkualitas di kabupaten, mengembangkan ekosistem kesehatan digital terpadu serta mentransformasi layanan primer, rujukan dan sistem pembiayaan kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan penjabaran atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 ini didasarkan pada penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, dan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Proses penyusunan Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ini dilakukan secara bertahap dan merupakan ekstraksi dari kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Tujuan pembangunan berkelanjutan, Kebijakan Pembangunan Daerah, aspirasi dari desa dan kecamatan serta mitra/lembaga yang memiliki program di Kabupaten Lombok Tengah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6178); 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 17. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemnuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045;
 22. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 74 Tahun 2021 tentang edudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perenanaan pembangunan kesehatan dan merupakan

kerangka dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan oada lima tahunan kedepan (2025-2026).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

a. Menjadi Pendoman dan Acuan

- Menjabarkan visi dan misi daerah ke dalam program dan kegiatan bidang kesehatan.
- Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) sehingga perencanaan lebih terarah.
- Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

b. Meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi

- Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- Menyediakan instrumen untuk mengukur pencapaian kinerja, sehingga memudahkan penyusunan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan.
- Menjadi dasar evaluasi kinerja Dinas Kesehatan dan UPTD di bawahnya.

c. Memastikan efektivitas dan efisiensi

- Mengupayakan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi semua upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknisnya.
- Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- Mengarahkan agar kegiatan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penyusunan restra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan permasalahan yang ada pada perangkat daerah serta strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah beserta indikator kinerjanya serta dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pagu indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah serta Indikator Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai Tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesehatan yang mana memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kesehatan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3) Sub Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang yang terdiri dari :

- 1) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Sumberdaya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kesehatan serta mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, DPA dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - 2) Penetapan kebijakan teknis dibidang Kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah;
 - 3) Perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan;
 - 5) Pembinaan dan fasilitasi dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan;

- 6) Pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Kesehatan;
 - 7) Pemberian pertimbangan dan penetapan perjanjian serta rekomendasi teknis dibidang Kesehatan;
 - 8) Pengkoordinasian pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - 9) Pengkoordinasian Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Kesehatan;
 - 10) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - 11) Pelaksana pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rogram dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mempunyai fungsi :
- 1) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas.
 - 3) Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
 - 4) Pengkoordinasian Penyusunan Pelayanan Mininam dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - 5) Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - 6) Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

- 7) Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait;
 - 9) Pelaksanaan pengatuan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - 10) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawain mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan administrasi kepegawain rumah tangga, protokol dan perlengkapan serta mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - 2) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawain, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
 - 3) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawain dan kebutuhan perlengkapan;
 - 4) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketataklasan pelaksanaan Dinas;
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawain lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
 - 8) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan penyimpan barang;

- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas serta mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
 - 2) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup Dinas;
 - 5) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
 - 6) Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
 - 7) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
 - 8) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 9) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kas (PPK,PPTK);
 - 10) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 11) Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

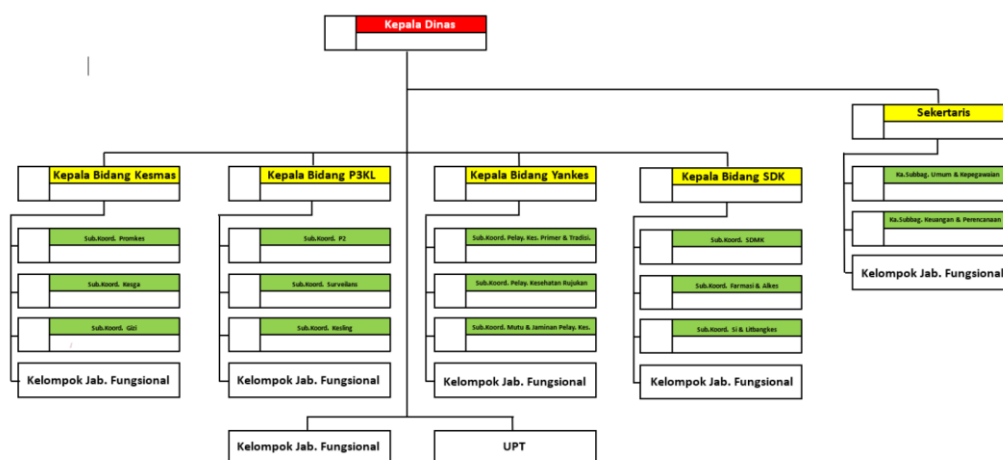
- 12) Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
 - 13) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 14) Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;
 - 15) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 16) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
 - 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan bidang kesehatan masyarakat serta mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
 - 3) Perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang Kesehatan Masyarakat;
 - 4) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Penyiapan bimbingan dan fasilitasi teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;;
 - 6) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan program kerja bidang pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan instansi terkait;
 - 7) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Kesehatan Masyarakat;

- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan bahan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan serta mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
 - 3) Penyiapan perumusan kebijakan operasionan di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - 4) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operisonal di Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - 5) Penyiapan koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan dan fasilitasi di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - 6) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan program kerja bidang pembinaan Kesehatan Masyarakat degan instansi terkait;
 - 7) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Kesehatan Masyarakat;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan bahan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan serta mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, akreditasi dan jaminan kesehatan;
 - 5) Penyiapan koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, akreditasi dan jaminan kesehatan;
 - 6) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Pelayanan Kesehatan;
 - 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan bahan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan serta mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Sumber Daya Kesehatan;
 - 3) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
 - 4) Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja bidang pembinaan Sumber Daya Kesehatan dengan instansi terkait
 - 5) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - 6) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasional bidang Sumber Daya Kesehatan;

- 7) Penyiapan koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan dan fasilitasi teknis di bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan bahan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan penunjang tertentu;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam upaya untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dilakukan penataan penempatan tenaga medis baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi serta tenaga paramedis seperti bidan dan perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Data Tahun 2024 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan yang berstatus ASN dan Non ASN yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Rumah Sakit dan Puskesmas/Jaringannya sebanyak 3272 orang dengan data sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaiannya

Unit	ASN	Non ASN	Jumlah
Dinas Kesehatan	75	46	121
RSUD Praya	357	66	423
Puskesmas	1608	1523	3131
Laboratorium Kesehatan	29	23	52
Total	2040	1658	3727

Gambar 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Apoteker	54
2	Tenaga Teknis Kefarmasian	181
3	Bidan	1041
4	Dokter	192
5	Dokter Gigi	30
6	Keteknisian Medis	154
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	100
8	Perawat	1449
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	149
10	Tenaga Teknik Biomedika	145
11	Tenaga Gizi	176
12	Tenaga Kesehatan Lingkungan	57
	Total	3728

b. Analisi Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil desh perencanaan kebutuhan Tenaga kesehatan atau couching klinis TENAGA kesehatan tahun 2024, pemenuhan Tenaga Tenaga kesehatan dilakukan melalui pengadaan CPNS dan PPPK, namun tahun 2024 pemenuhan Tenaga kesehatan dilakukan melalui pengadaan formasi PPPK, dapat di simpulkan bahwa pengadaan PPPK tahun ini untuk kabupaten Lombok Tengah mendapat formasi prioritas dari Kementrian Kesehatan dan sisanya adalah formasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarakan kebutuhan

dan anggaran belanja pegawai. . Adapun pemenuhan formasi PNS dan PPPK dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2. 1 Analisis Kebutuhan Pegawai Melalui Formasi Pengadaan P3K Tahun 2024

Tipe Faskes	Nama Faskes	Jenis Nakes	Kebutuhan Pengadaan ASN 2024
Laboratorium Kesehatan	UPTD LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DINKES KAB. LOMBOK TENGAH	Pranata Laboratorium Kesehatan - ATLM	1
Laboratorium Kesehatan	UPTD LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DINKES KAB. LOMBOK TENGAH	Epidemiolog Kesehatan	1
Laboratorium Kesehatan	UPTD LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DINKES KAB. LOMBOK TENGAH	Entomolog Kesehatan	1
Laboratorium Kesehatan	UPTD LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DINKES KAB. LOMBOK TENGAH	Pranata Laboratorium Kesehatan - Biologi	1
Laboratorium Kesehatan	UPTD LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DINKES KAB. LOMBOK TENGAH	Pranata Laboratorium Kesehatan - Kimia	1
Puskesmas	AIK DAREK	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	AIK DAREK	Dokter	1
Puskesmas	AIK MUAL	Pranata Laboratorium Kesehatan	0
Puskesmas	AIK MUAL	Jabatan Pelaksana Keuangan	1
Puskesmas	AIK MUAL	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	AIK MUAL	Dokter	1
Puskesmas	BAGU	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	BAGU	Nutrisionis	1
Puskesmas	BATU JANGKIH	Dokter Gigi	1
Puskesmas	BATU JANGKIH	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	BATUNYALA	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	BONJERUK	Dokter Gigi	0
Puskesmas	BONJERUK	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	DAREK	Dokter Gigi	0
Puskesmas	DAREK	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	DAREK	Dokter	1
Puskesmas	GANTI	Dokter Gigi	1
Puskesmas	GANTI	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	GANTI	Dokter	2
Puskesmas	GANTI	Perawat	1
Puskesmas	GANTI	Bidan	1
Puskesmas	GANTI	Nutrisionis	1
Puskesmas	JANAPRIA	Perawat	1
Puskesmas	KOPANG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	KUTA	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	LANGKO	Dokter Gigi	1
Puskesmas	LANGKO	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	LANGKO	Dokter	1
Puskesmas	LANGKO	Perawat	3
Puskesmas	MANGKUNG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	MANTANG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	MUJUR	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1

Tipe Faskes	Nama Faskes	Jenis Nakes	Kebutuhan Pengadaan ASN 2024
Puskesmas	MUNCAN	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Dokter Gigi	1
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Apoteker/Asisten Apoteker	1
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Jabatan Pelaksana Keuangan	1
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Dokter	2
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Perawat	2
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Bidan	3
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1
Puskesmas	PELABUHAN AWANG	Nutrisionis	2
Puskesmas	PENGADANG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	PENGADANG	Perawat	2
Puskesmas	PENGADANG	Nutrisionis	1
Puskesmas	PENUJAK	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	PRAYA	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	PRINGGARATA	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	PUYUNG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	PUYUNG	Nutrisionis	1
Puskesmas	SENGKOL	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	TANAK BEAK	Dokter Gigi	1
Puskesmas	TANAK BEAK	Jabatan Pelaksana Keuangan	1
Puskesmas	TANAK BEAK	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	TANAK BEAK	Dokter	1
Puskesmas	TANAK BEAK	Nutrisionis	1
Puskesmas	TERATAK	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	TERATAK	Perawat	1
Puskesmas	TERUWAI	Dokter Gigi	1
Puskesmas	TERUWAI	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1
Puskesmas	TERUWAI	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	TERUWAI	Dokter	1
Puskesmas	TERUWAI	Nutrisionis	2
Puskesmas	UBUNG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	WAJAGESENG	Jabatan Pelaksana Teknologi Informasi	1
Puskesmas	WAJAGESENG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas AIK MUAL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BUNUT BAKO	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas AIK MUAL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa JAGO	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas AIK MUAL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MERTAK TOMBOK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas AIK MUAL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MONTONG TEREP	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PRAYA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa GERUNUNG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PRAYA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SEMAYAN	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PUYUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BAREJULAT	Perawat	1

Tipe Faskes	Nama Faskes	Jenis Nakes	Kebutuhan Pengadaan ASN 2024
Puskesmas Pembantu	Puskesmas UBUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BATU TULIS	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BONJERUK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BONJERUK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PUYUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa GEMEL	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas UBUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa JELANTIK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas UBUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa LABULIA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas UBUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa NYEROT	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BONJERUK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PENGENJEK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PUYUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PUYUNG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PUYUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SUKARARA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANTANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BARABALI	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas AIK DEREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BEBER	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANTANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BUJAK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas AIK DEREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PAGUTAN	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANTANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PERESAK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas AIK DEREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SELEBUNG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANTANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa TAMPAK SIRING	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERUWAI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BANGKET PARAK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERUWAI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa GAPURA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas SENGKOL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa KAWO	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas SENGKOL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa KETARA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas SENGKOL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PENGEMBUR	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERUWAI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PENGENGAT	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas SENGKOL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SEGALA ANYAR	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERUWAI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SUKADANA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas SENGKOL, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa TANAK AWU	Perawat	1

Tipe Faskes	Nama Faskes	Jenis Nakes	Kebutuhan Pengadaan ASN 2024
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANGKUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BANYU URIP	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PENUJAK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BONDER	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANGKUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa KATENG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANGKUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MANGKUNG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANGKUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MEKAR SARI	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANGKUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SELONG BLANAK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PENUJAK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SETANGGOR	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas GANTI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BELEKA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas GANTI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BILELANDO	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas GANTI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa LANDAH	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas GANTI, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SEMOYANG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas JANAPRIA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa LEKOR	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas JANAPRIA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PENDEM	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas JANAPRIA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SABA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BAGU, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BAGU	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BAGU, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BILEBANTE	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PRINGGARATA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PEMEPEK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BAGU, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SINTUNG	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas WAJAGESENG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa AIK BUAL	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas KOPANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BEBUAK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MUNCAN, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa DARMAJI	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MUNCAN, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa DASAN BARU	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas WAJAGESENG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa LENDANG ARE	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MUNCAN, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MONGGAS	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas KOPANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MONTONG GAMANG	Perawat	1

Tipe Faskes	Nama Faskes	Jenis Nakes	Kebutuhan Pengadaan ASN 2024
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PENGADANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa BERAIM	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PENGADANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa JURANG JALER	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BATUNYALA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa KELEBUH	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BATUNYALA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa LAJUT	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BATUNYALA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PEJANGGIK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas PENGADANG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PRAI MEKE	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BATUNYALA, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SASAKE	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BATU JANGKIH, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa KABUL	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BATU JANGKIH, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MONTONG AJAN	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas BATU JANGKIH, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MONTONG SAPAH	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas DAREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PANDAN INDAH	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas DAREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa PELAMBIK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas DAREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa RANGGAGATA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas DAREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SERAGE	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas DAREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa TEDUH	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas DAREK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa UNGGA	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERATAK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa AIK BERIK	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERATAK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa AIK BUKAQ	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERATAK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MASMAS	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERATAK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SETILING	Perawat	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MANGKUNG, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa MEKAR SARI	Bidan	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas MUNCAN, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa DASAN BARU	Bidan	1
Puskesmas Pembantu	Puskesmas TERATAK, Puskesmas Pembantu Kelurahan/Desa SETILING	Bidan	1
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0

Tipe Faskes	Nama Faskes	Jenis Nakes	Kebutuhan Pengadaan ASN 2024
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular	1
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Spesialis Urologi	0
Rumah Sakit	RS Umum Daerah Praya	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi	1
Rumah Sakit	RS Umum Daerah Praya	Dokter Spesialis Anak	0
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	0
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik	1
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Spesialis Radiologi	0
Rumah Sakit	RS Umum Praya	Dokter Spesialis Neurologi	1

Pemenuhan Tenaga kesehatan melalui formasi PPPK Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 adalah berjumlah 161 jenis Tenaga yang terdiri Formasi Prioritas dan 61 Formasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis, total keseluruhan Formasi berjumlah 222 pada tahun 2024. Salah satu sistim pemenuhan Tenaga kesehatan selain PNS dan PPPK adalah dengan melakukan kontrak daerah, kontrak dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun yang paling memungkinkan dari ketiga sistem pemenuhan tersebut adalah kontrak daerah dan BLUD untuk rumah sakit dan puskesmas. Di Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini pemenuhan dilakukan dengan kontrak daerah namun tidak semua Tenaga kesehatan diakomodir dengan sistim ini dimana sistem penggajian disesuaikan dengan kemampuan daerah yang jauh dari UMR sehingga kedepan sistim penggajian harus ditinjau kembali dan harus mengacu kepada UMR. Kemudian pemenuhan dengan sistin BLUD hanya baru bisa dilakukan di RSUD Praya dan 5 puskesmas yaitu puskesmas Praya, Puskesmas Puyung, puskesmas Aik Mual, Puskesmas Aik Darek dan Puskesmas Janapria namun sistim BLUD puskesmas ini belum sepenuhnya, sehingga kedepan salah satu cara pemenuhan Tenaga kesehatan adalah dengan menjadikan BLUD untuk semua puskesmas secara mandiri.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan pelayanan kesehatan, Kabupaten Lombok Tengah ditunjang oleh sarana dan prasarana antara lain, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Polindes, Posyandu, Puskesmas Keliling, Alat Medis, Ambulan dan lainnya. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Rumah Sakit	: 6	Unit
a. Daerah	: 1	Unit
b. Swasta	: 4	Unit
c. Provisisi	: 1	Unit
2. Puskesmas	: 29	Unit
3. Laboratorium Kesehatan	: 1	Unit
4. Unit Transfusi Darah	: 1	Unit
5. Puskesmas Pembantu	: 92	Unit
6. Polindes/Poskesdes	: 123	Unit
7. Posyandu	: 1740	Unit
8. Instalasi Farmasi	: 1	Unit
9. Poskestren	: 28	Unit
10. Pos UKK	: 37	Unit
11. Pusat Informasi Kesehatan	: 29	Unit
12. Puskesmas Keliling	: 29	Unit
13. Ambulan	: 38	Unit

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengarah pada pembangunan kesehatan yang secara nasional menjadi prioritas, mengingat permasalahan kesehatan yang muncul dan semakin berkembang seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin global.

Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	NSPK	IKK	TARGET					REALISASI CAPAIAN					PERSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	21383	20058	20006	17288	14148	21244	20609	19502	17288	14871	99	103	97	100	105
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	20312	19146	19096	17288	13505	20370	19525	18839	17195	1450	100	102	99	99	11
Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	19354	18234	18613	71400	12862	20185	19229	18676	60180	14959	104	105	100	84	116
Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	72756	72076	71735	151107	93089	50672	58122	73245	120541	77555	70	81	102	80	83
Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	86570	149079	150120	638000	176082	69274	30695	150120	138045	135651	80	21	100	22	77
Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	596857	625672	631946	108621	716614	68759	13024	228029	72926	519269	12	2	36	67	72
Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	88994	100706	104601	108621	103932	7607	50829	50851	72926	88674	9	50	49	67	85
Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	176903	58731	45887	46514	51119	40464	58731	41757	41884	46099	23	100	91	90	90
Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	v	v	47311	9879	10017	10154	11159	848	9505	9115	9287	11032	2	96	91	91	99
Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	v	v	2484	2560	2588	1976	2330	974	1172	1301	1976	1910	39	46	50	100	82

INDIKATOR	SATUAN	NSPK	IKK	TARGET					REALISASI CAPAIAN					PERSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	v	v	16766	16765	16765	17680	16313	1854	3537	6070	11500	14987	11	21	36	65	92
Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	v	v	51931	51100	53654	23234	19987	15042	9720	18087	21208	18702	29	19	34	91	94
Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			3100	3104	3108	3640	3891	924	975	1219	1469	1434	30	31	39	40	37
Orang Dengan Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			242	277	293	220	208	44	37	73	76	64	18	13	25	35	31
Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR	SATUAN	NSPK	IKK	TARGET					REALISASI CAPAIAN					PERSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar	%			80	90	100	100	100	80	81,37	83	92,61	95,82	100	90	83	93	96
Persentase PIRT yang diterbitkan	%			70	75	80	85	90	70	75	80	85	60	100	100	100	100	67
Cakupan posyandu keluarga aktif	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

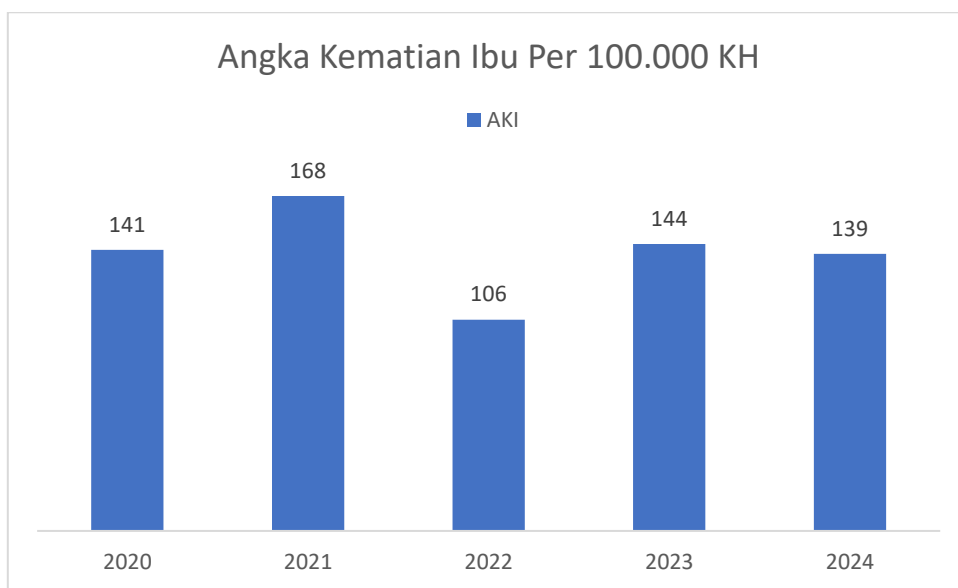
INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	99%	100%	97%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100%	102%	99%	99%	100%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	84%	100%
Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	70%	81%	102%	80%	83%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	80%	21%	100%	22%	77%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	12%	2%	36%	67%	72%
Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	9%	50%	49%	67%	85%
Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Persen	100	100	100	100	100	23%	100%	91%	90%	90%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	2%	96%	91%	91%	99%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	39%	39%	46%	50%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	11%	11%	21%	36%	65%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	29%	29%	19%	34%	91%

Dari tabel diatas menjelaskan data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang menjelaskan terkait capaian dari masing-masing indikator baik dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ataupun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari data diatas menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang belum optimal sehingga perlu adanya strategi optimalisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah perbaikan tersebut dimaksudkan supaya dapat menunjang beberapa indikator yang lebih optimal seperti :

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilan atau pengelolaannya, tetapi bukan sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Target tahun 2024 jumlah kematian ibu sebesar 120 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dari target MDG's. di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 jumlah kematian ibu sebanyak 21 kasus dari 15108 kelahiran hidup atau 139 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih diatas target RPJMD tahun 2024 yaitu 120 per 100.000 kelahiran hidup tetapi berada dibawah angka target nasional yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup.

Grafik 2. 1 Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2024



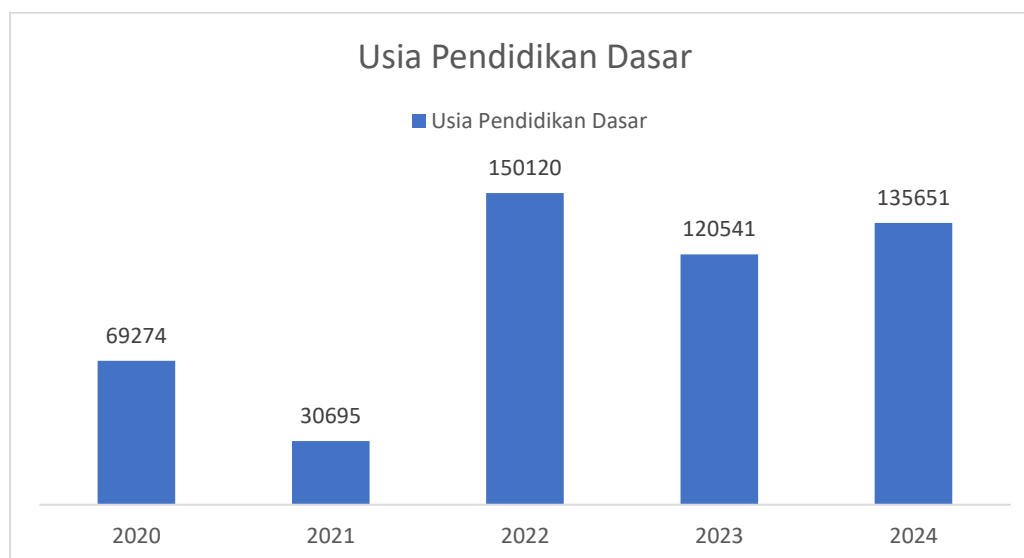
Sumber : Sub Bidang Kesehatan Keluarga

Hambatan yang masih ditemui adalah peran puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK belum optimal, belum seluruh fasilitas pemberi layanan KIA (Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Bersalin) memberikan pelayanan antenatal sesuai standar antenatal terpadu (10T), kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan neonatus (asfiksa) dan deteksi dini dan ibu hamil resiko tinggi masih kurang, serta sistem rujukan yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa strategi telah disusun antara lain optimalisasi peran puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan pemberi layanan KIA dalam rangka memantau dan meningkatkan mutu pelayanan KIA, meningkatkan tenaga.pengelola program Dinas Kesehatan dan Puskesmas secara berkala, dan optimalisasi sistem rujukan maternal neonatal.

b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator kinerja persentase kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2024 dari sasaran 176082 tercapai sebesar 135651 (77%). Perentase dari indikator ini belum mencapai target disebabkan oleh pemahaman tentang definisi operasional usia pendidikan dasar oleh petugas tidak dipahami dengan baik sehingga pelayanan yang dilaporkan oleh beberapa puskesmas hanya dilakukan di sekolah dasar saja dan tidak dilaporkan ketika diberikan pelayanan di SLTP sederajat.

Grafik 2. 2 Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024



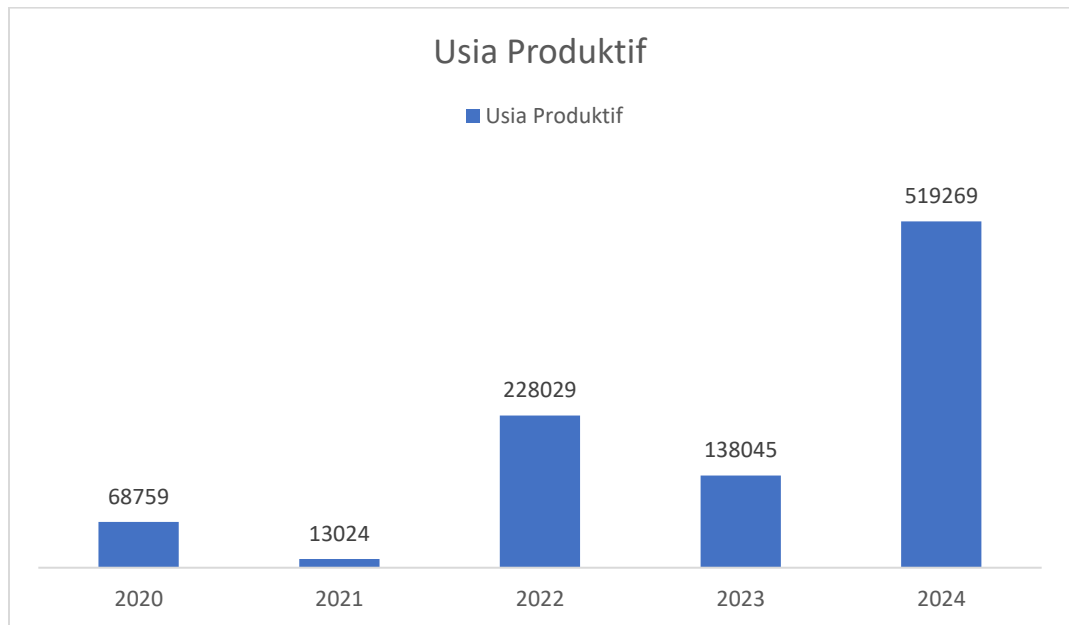
Sumber Sub Bidang Kesehatan Keluarga

c. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Indikator Kinerja persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Seksi Penyakit Tidak Menular (PTM) dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia 15-59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining sesuai dengan standar pelayanan dalam kurun satu tahun.

Dari tabel 2.1 di atas terlihat untuk indikator persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif terlihat sudah terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 meski belum mencapai target 100%. Kendala atau masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain komitmen stakeholder dalam mendukung pelaksanaan skrining PTM prioritas masih kurang, promosi kesehatan terkait skrining PTM prioritas belum dilakukan secara sistematis dan massif, belum tercukupinya alat kesehatan dan BMHP untuk skrining Prioritas, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan termasuk FKTP Swasta.

Grafik 2. 3 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2020-2024



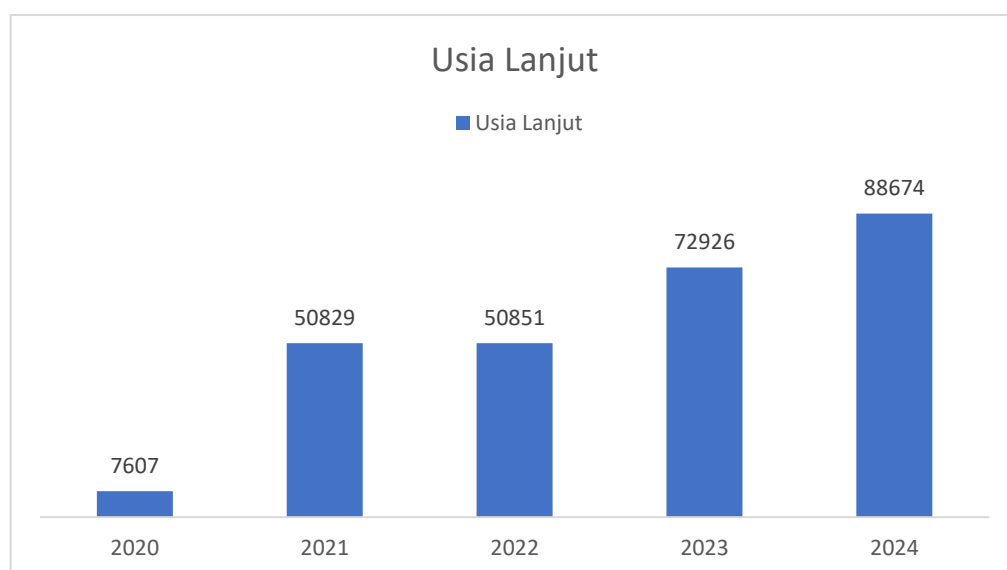
Sumber Sub Bidang Kesehatan Keluarga dan P2

Jika dilihat dari grafik diatas dari tahun 2020 sampai dengan 2024 capaian pelayanan usia produktif ini mengalami turun naik capainnya, namun di Tahun 2024 jumlah pelayanannya meningkat dan capaiannya paling tinggi diantara capaian 4 (empat) tahun terakhir. hal ini dikarenakan pencatatan sudah mulai tercatat dengan rapi dan meningkatnya kualitas tenaga kesehatan.

d. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut ini mengalami kenaikan capaian dari Tahun 2023 yaitu 67%(72926) ke Tahun 2024 sebanyak 85% (88674). Target ini memang masih jauh dari target yang telah ditentukan yaitu 103932. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi lansia untuk hadir ke posyandu keluarga sehingga mempengaruhi capaian sasaran lansia yang ditargetkan.

Grafik 2. 4 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tahun 2020-2024



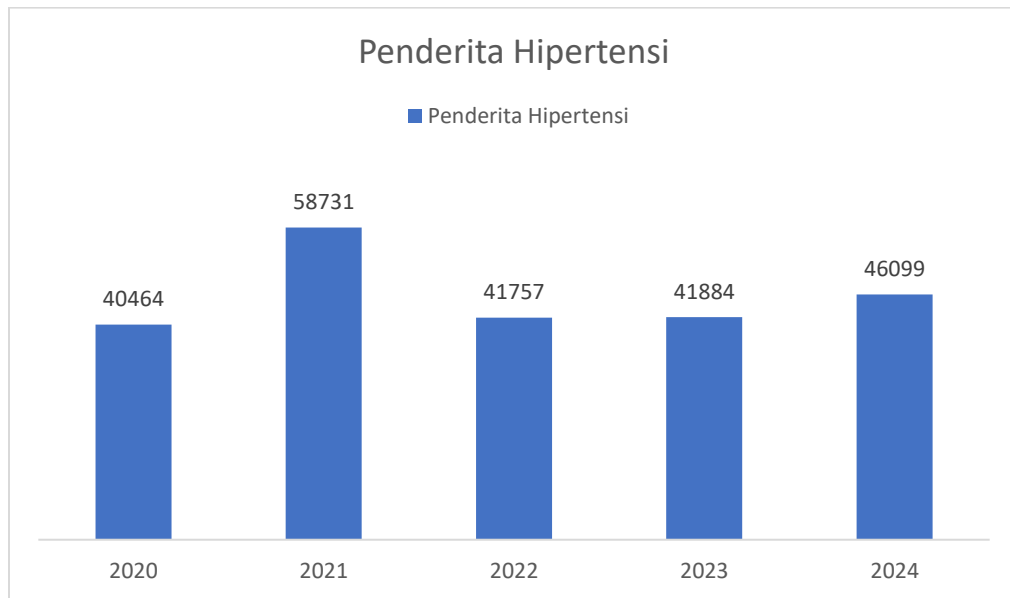
Sumber Sub Bidang Kesehatan Keluarga

Berdasarkan tabel diatas pelayanan kesehatan usia lanjutnya pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dikarenakan sudah mulai optimal program dan kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan pada usia lanjut ini. Meski demikian capaian ini belum memberikan hasil 100% yang telah ditarget oleh pusat.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi

Dari tabel 2.1 diatas terlihat untuk indikator persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi berada diangka 90% (46099) di Tahun 2024. Indikator ini belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh komitmen stakeholder dalam mendukung pelaksanaan skrining PTM prioritas masih kurang, promosi kesehatan terkait skrining PTM prioritas belum dilakukan secara sistematis dan massif, belum tercukupinya alat kesehatan dan BMHP untuk skrining Prioritas, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan termasuk FKTP Swasta. Namun jika dilihat dari capaian Tahun 2023 (41884) capaian Tahun 2024 ini sudah mengalami peningkatan.

Grafik 2. 5 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2020-2024

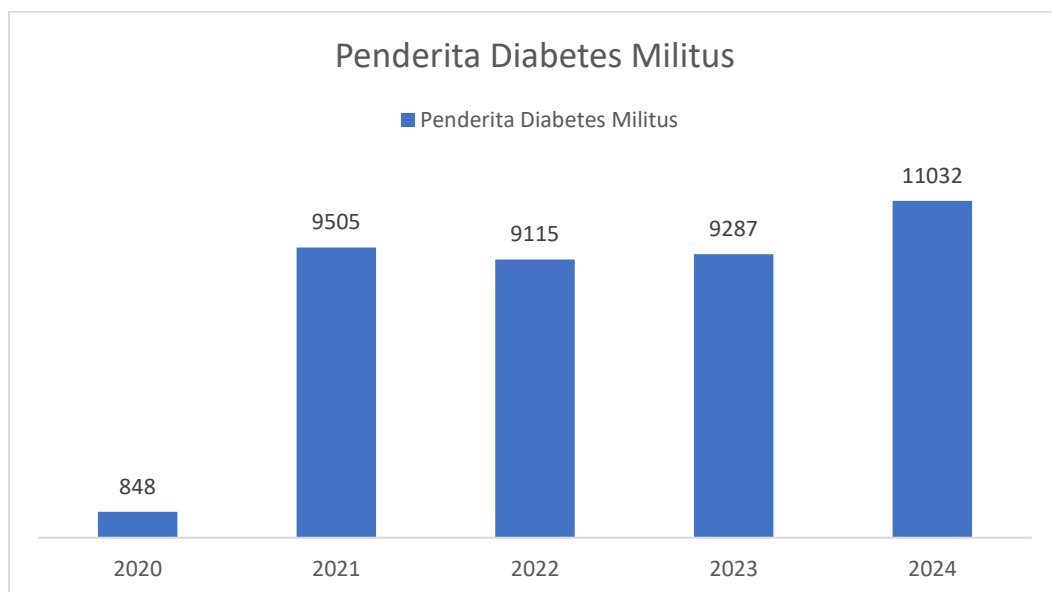


Sumber Sub Bidang Pengendalian Penyakit (P2)

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan jumlah penderita yang telah dilayani sebanyak 58731 orang kemudian terjadi penurunan di tahun 2022 yang hanya mampu mencapai pelayanan 41757 orang. Dan di tahun 2023 sampai 2024 capaian ini meningkat sudah mencapai angka 46009 atau 90% dari target yang diberikan oleh pusat yaitu sebanyak 46514 orang ditahun 2024.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus

Grafik 2. 6 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Tahun 2020-2024



Sumber Sub Bidang Pengendalian Penyakit (P2)

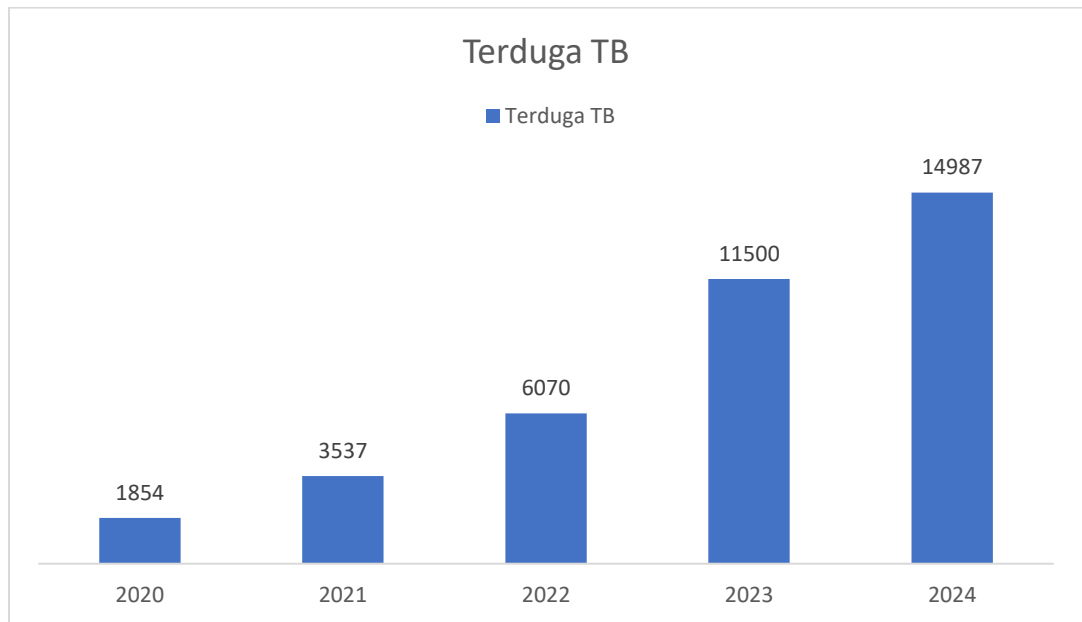
Capaian indikator pelayanan pada penderita diabetes militus dari Tahun 2023 (91%) ke Tahun 2024 (99%) mengalami peningkatan sebanyak 8% dari target 11159 dan yang sudah terlayani sebanyak 11032 penderita diabetes militus. Jika dilihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya capaian ini mengalami trend yang baik meski capaian ini belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain komitmen stakeholder dalam mendukung pelaksanaan skrining PTM prioritas masih kurang, promosi kesehatan terkait skrining PTM prioritas belum dilakukan secara sistematis dan massif, belum tercukupinya alat kesehatan dan BMHP untuk skrining Prioritas, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan termasuk FKTP Swasta.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga tuberkulosis di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Cakupan pelayanan orang terduga tuberkulosis tiap tahun sudah mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dimana di Tahun 2020 orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 1854 orang, di Tahun 2021 sebanyak 3537 orang kemudian naik di Tahun 2022 sebanyak 6070, dan mengalami peningkatan yang signifikan di Tahun 2023 11500 orang dan Tahun 2024 sebanyak 14987 orang. Di Tahun 2024 capaian indikator ini berada di persentase 92% dari target 100% (16313 orang terduga TB). Adapun peningkatan pelayanan ini di dorong oleh penguatan akses layanan TB yang bermutu, pengendalian faktor risiko TB, peningkatan kemitraan TB serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang masih mempengaruhi capaian indikator ini antara lain layanan sering mengalami kesulitan dalam melakukan *entry* pelaporan pada aplikasi SITB, kurangnya BMHP (*pot Sputum*), media KIE belum tersedia di semua layanan, pengiriman logistik *catridge* TCM yang mengalami keterlambatan.

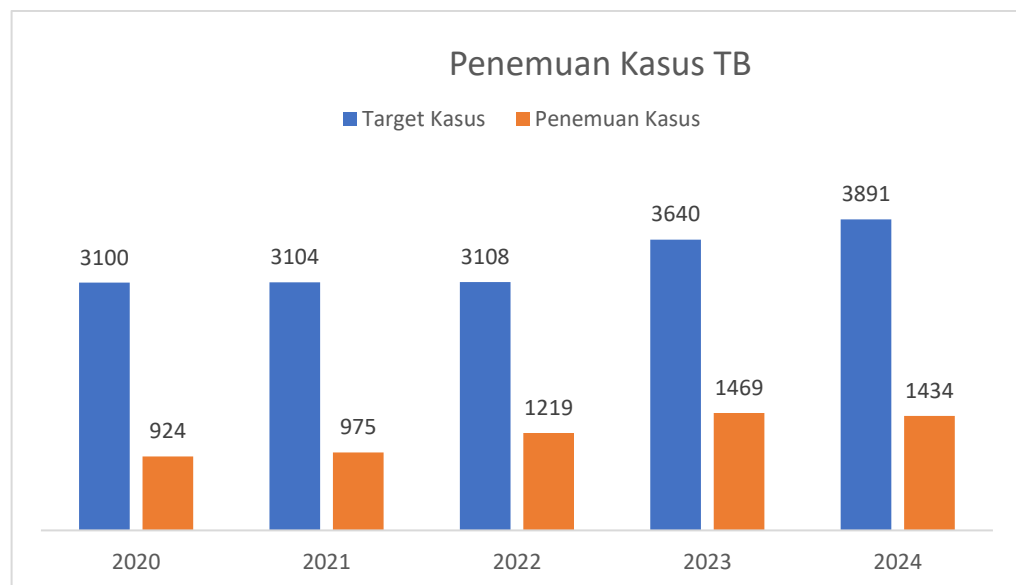
Grafik 2. 7 Pelayanan Pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2020-2024



Sumber Sub Bidang Pengendalian Penyakit (P2)

Untuk penemuan kasus TBC di Tahun 2023 sebanyak 1469 orang sedangkan di Tahun 2024 ditemukan sebanyak 1434 kasus positif TB. Jumlah kasus ini masih jauh dari target yang diberikan oleh Pusdatin yang mana di target Tahun 2023 sebanyak 3640 dan Tahun 2024 sebanyak 3891. Adapun tren penemuan kasus positif TB bisa dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 2. 8 Penemuan Kasus Positif TB Tahun 2020-2024



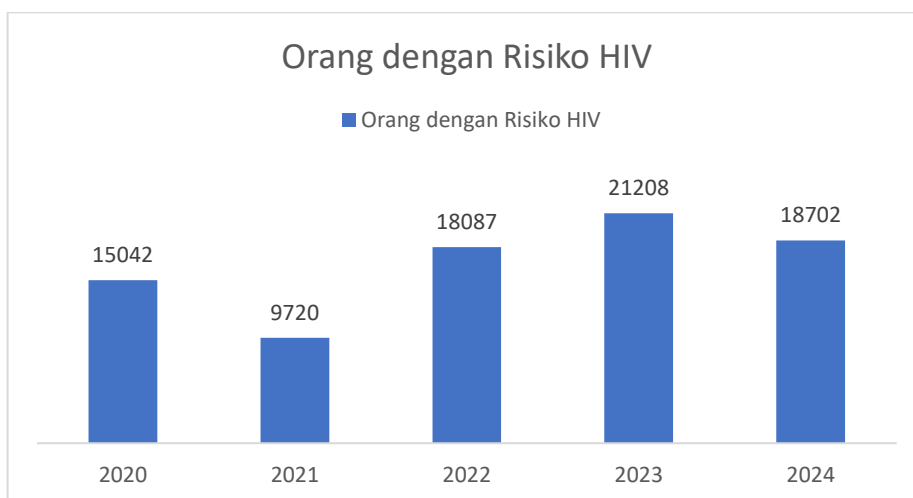
Sumber Sub Bidang Pengendalian Penyakit (P2)

Penemuan kasus positif TB dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan meski capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang belum mau melakukan pemeriksaan

kesehatan atau pengobatan dikarenakan masih tingginya stigma negatif yang beredar di kalangan masyarakat khususnya terkait dengan penyakit TB ini.

h. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

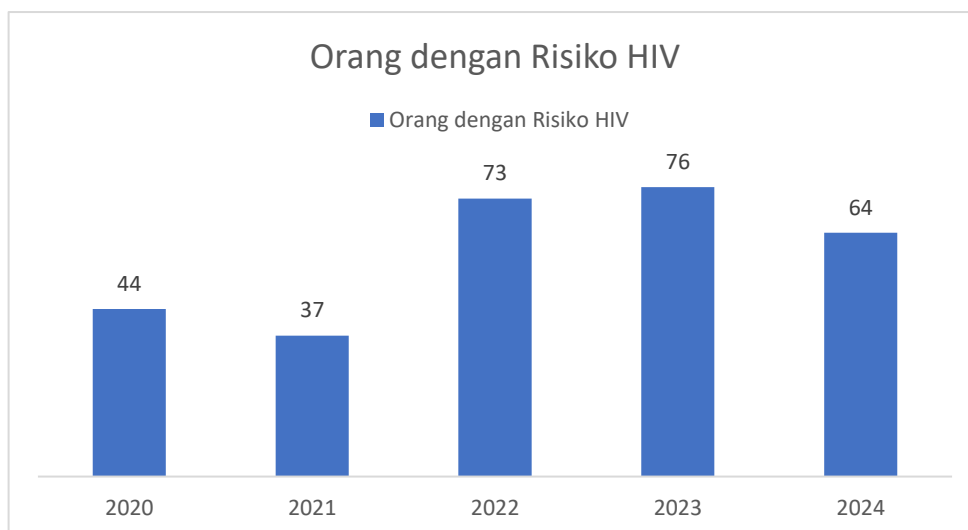
Grafik 2. 9 Pelayanan Pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2020-2024



Sumber Sub Bidang Pengendalian Penyakit (P2)

Capaian pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV pada Tahun 2024 mengalami penurunan capaian yaitu 18702 orang dari Tahun 2023 sebanyak 21208 orang. Hal ini disebabkan oleh adanya pergantian PIC di beberapa puskesmas, sistem pencatatan pelaporan yang belum optimal, koordinasi antar lintas program yang masih belum optimal serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian program sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan secara terintegrasi dengan program lainnya yang terkait.

Grafik 2. 10 Penemuan Kasus Positif HIV Tahun 2020-2024



Sumber Sub Bidang Pengendalian Penyakit (P2)

Penemuan kasus HIV dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang menarik. Jumlah kasus HIV menurun dari 44 kasus pada tahun 2020 menjadi 37 kasus pada tahun 2021, namun kemudian meningkat signifikan menjadi 73 kasus pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 76 kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus HIV menurun menjadi 64 kasus. Peningkatan kasus HIV pada tahun 2022 dan 2023 mungkin menunjukkan adanya peningkatan transmisi atau deteksi kasus yang lebih baik, sedangkan penurunan pada tahun 2024 bisa jadi hasil dari intervensi kesehatan masyarakat yang efektif atau perubahan perilaku masyarakat yang mau melakukan pengobatan.

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Tahun Ke -				Realisasi Tahun Ke -				Rasio Efektivitas Anggaran Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	218.894.309.225	256.362.913.420	276.852.368.829	263.820.329.939	186.944.356.498	225.814.482.139	254.624.184.577	160.123.036.853	0,85	0,88	0,92	0,61
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	53.197.204	36.555.354	36.520.795	83.910.020	53.197.204	36.555.064	36.520.615	7.000.000	1,00	1,00	1,00	0,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.056.314	139.962.333	115.194.065	174.055.064	77.002.382	80.657.583	69.863.885	50.578.000	1,00	0,58	0,61	0,29
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86.991.364.529	91.285.244.140	106.237.088.049	121.725.912.667	86.332.394.664	88.392.420.541	94.626.840.558	88.465.835.817	0,99	0,97	0,89	0,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.500.000	8.925.000	8.925.000	8.924.983	10.500.000	8.659.836	8.922.400	-	1,00	0,97	1,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	140.594.931	125.205.691	126.405.691	136.005.691	140.594.931	96.477.467	97.668.990	38.400.000	1,00	0,77	0,77	0,28
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	65.507.000	22.220.950	5.428.440	72.029.880	8.107.000	22.220.950	5.418.950	35.745.000	0,12	1,00	1,00	0,50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.245.706	3.607.250	5.567.051	52.845.334	4.245.300	3.607.250	5.548.400	3.258.718	1,00	1,00	1,00	0,06
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.095.000	15.380.750	15.706.475	15.092.705	18.095.000	15.379.600	15.696.030	-	1,00	1,00	1,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.090.000	12.826.500	33.954.000	33.954.000	14.306.918	12.663.700	33.648.353	5.149.840	0,95	0,99	0,99	0,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.309.279.603	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.122.704.216	1.260.753.181	1.293.611.753	1.043.915.671	0,86	0,97	1,00	0,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.787.500	98.296.000	98.296.000	98.296.000	69.787.500	82.167.988	82.312.000	32.000.000	1,00	0,84	0,84	0,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.311.600	142.278.000	152.414.350	171.925.960	194.311.600	119.910.461	136.203.260	4.708.360	1,00	0,84	0,89	0,03
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	618.265.325	6.353.770.777	19.811.530.000	5.872.499.680	612.003.565	6.319.682.235	19.023.794.600	5.859.199.950	0,99	0,99	0,96	0,02
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.767.286.350	7.201.187.460	12.215.334.537	8.065.043.733	11.292.595.660	6.613.378.965	11.963.364.901	7.058.166.899	0,96	0,92	0,98	0,88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Tahun Ke -				Realisasi Tahun Ke -				Rasio Efektivitas Anggaran Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pembangunan Puskesmas	16.835.020.000	4.027.281.138	31.780.168.900	16.508.280.728	9.994.643.112	77.809.890	30.958.146.549	4.609.796.020	0,59	0,02	0,97	0,28
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-	1.900.000.000	2.220.418.640	-	-	1.862.840.000	652.117.411	0,00	0,00	0,98	0,29
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.379.993.750	6.033.421.422	5.395.390.617	2.620.660.567	2.358.891.500	5.941.611.000	5.292.366.125	771.828.740	0,99	0,98	0,98	0,29
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	193.053.223	60.000.000	56.657.900	73.438.000	184.193.540	53.465.550	50.549.250	69.435.000	0,95	0,89	0,89	0,95
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.665.560.871	7.474.290.800	7.998.709.049	10.057.260.859	7.238.115.863	7.024.574.818	7.765.061.822	4.112.918.301	0,94	0,94	0,97	0,41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.223.034	382.112.186	277.750.000	225.202.250	45.942.684	323.012.016	277.044.000	199.542.500	0,51	0,85	1,00	0,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.839.888.420	6.694.626.999	5.474.392.218	5.419.834.218	5.440.368.165	6.196.679.079	4.884.720.391	1.820.490.964	0,93	0,93	0,89	0,34
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46.996.500	44.947.025	17.500.000	23.058.000	46.856.500	44.947.025	17.484.735	2.418.000	1,00	1,00	1,00	0,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.179.255	54.201.600	300.000	14.930.000	7.484.255	53.901.600	300.000	1.270.000	0,35	0,99	1,00	0,09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	26.250.000	10.000.000	14.960.000	-	26.249.800	9.947.435	1.215.000	0,00	1,00	0,99	0,08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	830.853.321	2.705.591.328	13.318.229.416	785.901.665	802.161.321	2.035.956.922	13.270.930.658	40.136.493	0,97	0,75	1,00	0,05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	105.677.331	146.966.128	100.000.000	166.325.000	105.677.331	146.956.328	100.000.000	-	1,00	1,00	1,00	0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	199.690.816	279.998.600	117.168.400	76.280.000	174.321.616	279.900.712	117.168.400	35.340.000	0,87	1,00	1,00	0,46
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	365.277.088	288.859.359	1.030.583.500	820.119.620	306.407.088	282.352.000	603.837.894	56.690.720	0,84	0,98	0,59	0,07
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.491.775.665	29.955.699.972	41.571.148.589	70.486.036.006	28.989.427.650	29.241.785.606	40.437.803.552	48.245.261.172	0,95	0,98	0,97	0,68
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.687.979.604	83.954.368	290.773.453	2.597.010.421	2.974.632.939	83.954.368	252.630.419	1.686.302.963	0,81	1,00	0,87	0,65
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5.193.768.600	4.608.276.300	5.906.119.294	4.386.911.169	3.364.136.677	1.949.016.310	2.123.057.719	217.288.646	0,65	0,42	0,36	0,05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	15.000.000	516.395.936	-	-	14.903.695	12.596.349	0,00	0,00	0,99	0,02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Tahun Ke -				Realisasi Tahun Ke -				Rasio Efektivitas Anggaran Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	14.952.435	14.942.000	-	-	14.112.435	-	0,00	0,00	0,94	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	23.984.400	25.060.000	-	-	23.960.880	750.000	0,00	0,00	1,00	0,03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	19.490.650	764.500.000	-	-	19.448.100	3.700.000	0,00	0,00	1,00	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	7.986.500	20.000.000	-	-	7.979.500	-	0,00	0,00	1,00	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	15.000.000	683.209.600	-	-	14.941.510	4.500.000	0,00	0,00	1,00	0,01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	13.986.300	139.973.896	-	-	13.977.300	-	0,00	0,00	1,00	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	51.052.992	-	9.475.185	30.837.570	50.686.992	-	9.431.985	25.067.370	0,00	0,00	1,00	0,81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	28.890.000	30.140.000	-	-	28.890.000	2.600.000	0,00	0,00	1,00	0,09
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	489.722.038	-	-	-	7.350.000	0,00	0,00	0,00	0,02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	-	19.439.506	-	-	-	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,10
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	30.065.800	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	74.731.600	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	65.992.931	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	214.340.000	-	-	-	31.760.000	0,00	0,00	0,00	0,15

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Tahun Ke -				Realisasi Tahun Ke -				Rasio Efektivitas Anggaran Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	41.453.946	45.000.000	27.449.204	31.912.568	41.436.075	44.994.950	20.286.200	21.884.000	1,00	1,00	0,74	0,69
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	6.008.495.579	5.993.141.514	5.353.438.711	5.366.210.543	4.773.659.368	4.142.597.975	4.700.855.249	4.998.921.114	0,79	0,69	0,88	0,04
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.501.488	200.000.000	3.642.799.959	1.610.752.236	41.437.488	199.641.200	2.525.645.760	1.275.477.660	0,79	1,00	0,69	0,14
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.080.000	-	13.680.000	147.145.800	30.979.800	-	13.680.000	16.000.000	1,00	0,00	1,00	0,11
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16.410.878	23.030.000	93.130.000	151.760.335	16.390.878	22.960.000	75.400.000	43.458.735	1,00	1,00	0,81	0,29
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	18.658.056	406.786.000	469.333.734	455.097.830	18.658.056	403.021.169	465.390.624	167.040.000	1,00	0,99	0,99	0,37
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	28.323.500	306.614.495	552.431.975	230.154.401	37.483.000	306.412.516	521.192.369	71.432.000	1,32	1,00	0,94	0,31
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	97.890.000	160.763.900	-	-	97.728.404	-	0,00	0,00	1,00	0,00

Tabel di atas menjelaskan mengenai anggaran pendanaan pelayanan perangkat daerah beserta perhitungan terkiat rata-rata pertumbuhan yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa uraian program dan kegiatan yang hanya dilaksanakan di Tahun 2023 dan 2024 seperti Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Lanjut Usia, Hipertensi, Diabetes Militus, ODGJ Berat, Tuberkulosis dan HIV, Bimbingan Teknis Supervisi UKBM.
- b. Ada beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, hal ini disebabkan karena kurangnya penanggaran pada perencanaan awal yang mengakibatkan anggaran untuk kegiatan tersebut kurang seperti:
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2023 dari total anggaran 3,642,799,959 yang terealisasi hanya 2,525,645,760. Dikarenakan kurang matangnya perencanaan yang dilakukan sehingga ada beberapa kegiatan yang yang tidak dilaksanakan.

4. Kelompok Sasaran Layanan

Setiap perangkat daerah wajib melaksanakan layanan yang baik kepada masyarakat maupun kepada *stakeholders* terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada masing-masing perangkat daerah. Berikut ini adalah jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 2. 5 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Pelayanan Administrasi, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Sarana dan Prasarana	Seluruh Bidang lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas Kabupaten Lombok Tengah
2	Bidang Kesehata Masyarakat	Pelayanan kesehatan yang berfokus pada Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah , Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas di

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
			Kabupaten Lombok Tengah
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Lombok Tengah
4	Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, surveilans, imunisasi dan krisis kesehatan dan kesehatan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah
5	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Pelayanan kesehatan yang berfokus pada sumber daya manusia, sarana kesehatan	Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dan <i>Stakeholder</i> di Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah

5. Mitra Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan tujuannya, yaitu **“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”** bekerjasama dengan instansi dan perangkat daerah lainnya. Berikut ini adalah instansi atau Perangkat Daerah yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 2. 6 Mitra Perangkat Daerah

No	Peran / Pelayanan	Mitra Kerja
1	Sebagai Pengelola Jaminan Kesehatan kepada masyarakat baik secara mandiri maupun PBI dengan sinergi yang baik, dapat mencapai tujuan bersama dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat	BPJS Kesehatan
2	Menyediakan data masyarakat yang membutuhkan Jaminan Kesehatan.	Dinas Sosial

No	Peran / Pelayanan	Mitra Kerja
3	Validasi data Kependudukan untuk pelayanan kesehatan	Dukcapil
4	Pemberian Pelayanan Kesehatan Kebencanaan	BPBD
5	Peyebarluasan Informasi Kesehatan dan Pelayanan 112	Diskominfo
6	Perizinan Fasilitas Kesehatan dan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP
7	Pengkoordinasian Pengelolaan lingkungan pada Fasilitas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pembiayaan penyusunan dokumen EHRA dan dokumen pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	PLAN/Transform
9	Penyusunan dokumen tanggap bencana Kab. Lombok Tengah	Berugak Desa
10	Pembiayaan, Logistik terkait ATM (Aids, Tuberkulosis dan Malaria)	Global Fun ATM, PKBI, Adinkes
11	Pendampingan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	INEY
12	Pengawasan Keamanan Pangan Olahan rumah tangga.	BPOM
13	Pengkoordinasian Pelayanan Kesehatan Umum dan Haji serta Sertifikasi Halal	Departemen Agama
14	Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	Disdik
15	Memberikan dukungan Pelayanan Kesehatan Keluarga	DP3AP2KB
16	Mendukung pelayanan kesehatan khususnya memanfaatkan perkarangan untuk pangan bergizi	Dinas Pertanian
17	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Bapperida
18	Penganggaran Pelayanan Kesehatan	BKAD
19	Pengawasan ASN	BKPSDM
20	Pengawasan Internal	Inspektorat
21	Membantu dalam membiayai kegiatan operasi katarak, memberikan bantuan sarana dan prasarana vision centre, mendukung dan mensupport bbrp kegiatan pertemuan dan pelatihan2 tenaga kesehatan, guru, dan kader dalam penanggulangan kebutaan.	FHF (The Fred Hollows Foundation)
22	Edukasi dan pemberdayaan masyarakat utk peningkatan kesehatan	TPKK dan PPI
23	Pendewasaan usia nikah	Rutgers
24	Pengampu Posyandu sebagai ujung tombak penyuluhan kesehatan	BPMD
25	Penyediaan air bersih dan perumahan sehat	Perkim

B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
- b. Masih adanya kasus kematian Bayi/Balita
- c. Masih adanya Balita Stunting
- d. Masih tingginya kasus kesakitan
 - 1) Penyakit Menular
 - Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
 - HIV/AIDS
 - TB Paru
 - Demam Berdarah Dengue (DBD)
 - 2) Penyakit Tidak Menular
 - Hipertensi
 - Diabetes Militus
 - Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- e. Belum meratanya pembangunan kualitas SDM Kesehatan
- f. Penguatan sistem rujukan yang belum optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2030 ditangkum pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB)	Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal, neonatal dan bayi
			Kurangnya peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB
		Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular	Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat
			Kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur masih kurang
			Pelaksanaan skrining penyakit tidak menular (PTM) belum optimal
			Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik individu maupun masyarakat masih kurang
			Prilaku seks bebas/penyalahgunaan obat
			Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular kepada masyarakat
			Lingkungan rumah dan pemukiman yang tidak sehat
		Saranan dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum optimal	Pembiayaan atas pemenuhan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas
			Lahan dan lokasi puskesmas masih terbatas
			Jumlah rumah sakit rujukan, puskesmas dan pustu masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk
		Masih adanya prevalensi stunting pada balita	Lingkungan sosial yang mencakup norma, makan bayi dan anak, hygiene makanan, pendidikan dan tempat kerja
			Lingkungan pemukiman yang mencakup ketersediaan air bersih, sanitasi dan kondisi bangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslah
		Sistem rujukan yang belum optimal	Masih belum optimalnya sistem teknologi dan informasi dalam penggunaan sistem rujukan terintergrasi <i>Public Safety Center (PSC)</i> belum menjadi UTD
		Belum meratanya pembangunan SDM Kesehatan	Penempatan tenaga kesehatan di sebagian puskesmas belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kesehatan tidak sesuai dengan analisi jabatan dan beban kerja puskesmas

2. Isu Strategis

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, dan isu yang berkembang saat ini, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah. Isu strategis yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (1)	Permasalahan Perangkat Daerah (2)	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah (3)	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Masyarakat 2. Pencegahan Penyakit 3. Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah 5. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan 6. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah 7. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaen Lombok Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Lingkungan 2. Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi 3. Kualitas Udara 4. Dampak Perubahan Iklim 5. Pengelolaan Limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 6. AFTA (Asean Free Trade Area) 7. SGGS (Sustainable Developments Goals) 8. Universal Coverage (Jaminan Kesehatan) 9. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 10. HAM (Hak Asasi Manusia) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi Daerah 2. Regulasi Kementransi Kesehatan belum mendukung semua daerah 3. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang pesat 4. Kebijakan JKN 5. Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok 6. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial 7. Pengarusutamaan Gender 8. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pemertataan tenaga kesehatan 2. Perizinan, standarisasi dan akreditasi pelayanan fasilitas kesehatan 3. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan 4. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan 5. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal 6. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat 7. Kondisi lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan 2. Masih adanya kasus balita stunting 3. Masih adanya kematian Bayi 4. Belum optimalnya pencapaian target penanganan dan penemuan kasus 5. Belum tercapainya target SPM Bidang Kesehatan 6. Jumlah sebaran dan kualitas tenaga kesehatan belum merata 7. Rendahnya desa siaga aktif di wilayah Kabupaten Lombok Tengah

					<p>umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung</p> <p>8. Perubahan gaya hidup, konsumsi makanan dan bahan makanan tambahan dengan pengawasan yang belum optimal</p> <p>9. Penutupan lokalisasi</p>	<p>8. Masih adanya fasilitas sarana kefarmasian, alat kesehatan dan sarana pengelolaan makanan dan minum yang belum memenuhi standar dan persyaratan perizinan</p>
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan Dan Sasaran Restra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan RPD Kabupaten Lombok Tengah yaitu **“Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkelanjutan”** dengan misi pertama **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas”** yang telah ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG REVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kesehatan Untuk Semua	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	72.48	73.17	73.86	74.54	75.23	75.91	DIKES
		Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Penurunan Kematian Ibu	Persen	4,2	8,7	9,5	10,5	5,9	6,3	KESMAS
			Persentase Penurunan Kematian Balita	Persen	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	KESMAS
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90	90	90	90	90	90	P3KL
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	99,03%	99,05%	99,08%	99,10%	99,13%	99,15%	YANKES
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,21	80,71	82,4	84,09	85,78	87,47	SEKRETARIAT

B. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan atau prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keselamatan ibu dan anak melalui peningkatan kualitas pelayanan PONEC dan PONEK, Implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, meningkatnya kualitas kader kesehatan dalam pendampingan ibu hamil, bayi dan ibu nifas, peningkatan peran PKK dan stakeholder yang lain dalam peningkatan pemahaman ibu hamil, masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan keselamatan ibu dan anak, peningkatan kepemilikan UHC.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan pelayanan lansia.
- c. Meningkatnya penanganan dan pencegahan penyakit menular strategis yaitu TBC, HIV dan DBD melalui peningkatan perilaku hidup bersih pada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, kualitas lingkungan, kualitas surveillance, peningkatan sekolah sehat, peningkatan pesantren sehat, peningkatan kepemilikan UHC.
- d. Meningkatnya penanganan dan pencegahan penyakit tidak menular melalui peningkatan perilaku aktivitas fisik, perilaku pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pola makan yang seimbang, peningkatan perilaku dalam merokok, pengembangan Kawasan tanpa rokok, peningkatan kepemilikan UHC.
- e. Meningkatnya kualitas kesehatan kerja untuk memutus rantai penularan penyakit menular.

- f. Meningkatnya kualitas perbaikan gizi masyarakat, terutama stunting dan obesitas melalui peningkatan perilaku konsumsi gizi seimbang.
- g. Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan rujukan melalui pengembangan fasilitas kesehatan rujukan dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.
- h. Meningkatnya tata kelola manajemen dinas kesehatan dengan strategi melalui Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana, Meningkatnya kinerja disiplin dan SDM Dinas Kesehatan dan Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran.

Tabel 3. 2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerataan akses layanan dasar melalui penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta revitalisasi Posyandu dan Puskesmas. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara masif.	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan modern, termasuk peralatan medis dan sistem informasi kesehatan.	Digitalisasi layanan kesehatan (e-rekam medis), penguatan sistem surveilans penyakit, dan penanganan terpadu PTM serta penyakit menular.	Pemerataan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, termasuk pelatihan kompetensi.	Konsolidasi kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, dan tata kelola kesehatan daerah yang berbasis kinerja dan kolaborasi multisektor.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang menggambarkan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor. Pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan melalui tahapan tema/fokus pembangunan tahunan mulai tahun 2026 hingga 2030. Setiap tema tahunan memuat fokus dan prioritas pembangunan, termasuk dalam bidang kesehatan.

Arah Kebijakan Kabupaten Lombok Tengah terkait urusan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan RPMJD terkait Kesehatan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4
1	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas	Peningkatan Mutu Infrastruktur dan Ketersediaan Alat Kesehatan (Alkes).	Memprioritaskan rehabilitasi, pembangunan, dan pemenuhan sarana-prasarana Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu/Pustu) dan meningkatkan kompetensi Rumah Sakit Daerah sebagai rumah sakit rujukan sesuai standar yang dipersyaratkan. Fokus pada pengadaan Alkes esensial dan modern yang terkalibrasi secara rutin. Proritas rehabilitasi ruang pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar(PONED) di Puskesmas Dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSUD, Pengadaan Alkes esensial KIA seperti USG bagi Puskesmas yang belum memiliki dan pergantian USG bagi yang sudah rusak dan tidak bisa di perbaiki, Resusitasi KIT neonatal, termasuk didalamnya pengadaan Infant resuscitator di setiap puskesmas
		Optimalisasi Pengelolaan Fasyankes melalui BLUD.	Mendorong dan memfasilitasi status BLUD pada Puskesmas dan RSUD agar memiliki fleksibilitas anggaran untuk segera menginvestasikan pendapatan mereka dalam peningkatan mutu fasilitas dan layanan melalui kebijakan kebijakan yang mendukung operasional puskesmas dan rumah sakit. Pemanfaatan Fleksibelitas anggaran BLUD(Puskesmas dan RSUD) untuk investasu secara cepat guna pemenuhan SDMK dan Alkes KIA/PONED/PONEK yang berdampak langsung untuk penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Pengetatan Perizinan dan Pengawasan Berbasis Mutu.	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap semua Fasyankes (Pemerintah dan Swasta) untuk memastikan kepatuhan terhadap mutu layanan, standar perizinan operasional, standar kesehatan lingkungan, standar keselamatan pasien dan manajemen resiko
		Peningkatan Pencapaian Akreditasi dan Standar Mutu Nasional.	Mewajibkan dan memfasilitasi semua Fasyankes, khususnya Rumah Sakit Kelas C/D dan Puskesmas, untuk berkomitmen mencapai dan mempertahankan status akreditasi tertinggi, serta memastikan kepatuhan terhadap Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP). Akreditasi harus memastikan kepatuhan terhadap standar manajemen resiko klinis KIA seperti audit maternal perinatal (AMP) dan INM spesifik seperti Kepatuhan ANC sesuai standar.
		Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Terintegrasi	Memastikan semua data layanan, rekam medis, dan stok logistik Fasyankes terhubung secara real-time ke pusat data Dinkes untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang cepat dan akurat.
		Penguatan Distribusi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMKes).	Mengalokasikan SDMKes (termasuk dokter spesialis, perawat, Bidan, tenaga ahli dan Tenaga Kesehatan Lainnya) secara merata di semua Fasyankes, serta meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan berbasis bukti klinis terbaru untuk mendukung operasional fasilitas yang berkualitas. Dsitribusi dan penempatan dokter obgyn, dokter anak dan bian terampil yang memiliki kompetensi persalinan normal dan kegawatdaruratan obstetri dan pelatihan kegawatdaruratan Maternal Neonatal bagi dokter dan bidan.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
2	Penyediaan layanan kesehatan bergerak (mobile)	Pemerataan dan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil dan Kepulauan.	Fokus pada pemanfaatan unit mobile untuk mempercepat akses layanan yang menjangkau masyarakat yang secara geografis sulit mengakses Puskesmas/RS. Mengupayakan penyediaan NETS (Neonatal Emergency Transportation Sytem) untuk memprmudah proses rujukan sesuai standar, dan Unit mobile dilengkapi mobile USG untuk skrining kehamilan resiko tinggi.
		Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Outreach dan Promotif-Preventif Berbasis Komunitas.	Fokus pada penggunaan layanan mobile sebagai sarana utama untuk skrining, penyuluhan, dan pencegahan penyakit (UKM), bukan hanya pengobatan kuratif (UKP). Layanan Mobile juga difokuskan untuk kunjungan rumah (sweeping) ibu hamil yang drop out ANC, kelas ibu hamil dan deteksi dini resiko tinggi pada bayi dan ibu hamil.
		Peningkatan Efisiensi dan Integrasi Layanan Kesehatan Primer dengan Layanan Rujukan.	Fokus pada penggunaan data dari layanan mobile untuk mengintegrasikan rekam medis dan merencanakan rujukan yang lebih efektif dari Puskesmas ke RSUD.
		Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Pelayanan Bergerak.	Fokus pada pelatihan tim (dokter, perawat, sanitarian) yang bertugas di unit mobile agar mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dan sesuai standar di lokasi terpencil.
3	Akreditasi layanan kesehatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rangka Pencapaian Akreditasi Fasyankes.	Mengalokasikan anggaran dan menyusun program pelatihan (TOT) secara terencana bagi seluruh SDM Fasyankes (Puskesmas, RSUD) dan Tim Pembina Teknis di Dinas Kesehatan, yang berfokus pada pemahaman standar akreditasi dan budaya mutu.
		Penguatan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Alkes) Sesuai Standar Akreditasi.	Mendorong pemanfaatan anggaran (termasuk dana BLUD) untuk pemenuhan persyaratan fisik dan non-fisik yang diwajibkan oleh standar akreditasi (misalnya: manajemen pengolahan limbah, pemeliharaan Alkes, kelengkapan ruangan dan pengadaan ambulan).

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Penyelenggaraan Sistem Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasca Akreditasi secara Berkesinambungan.	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan mutu layanan yang sudah terakreditasi untuk dipertahankan dan ditingkatkan, bukan hanya tercapai sekali. memastikan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) berjalan sesuai dengan jadwal.
		Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Guna Mendukung Pengukuran Indikator Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan.	Memastikan seluruh Fasyankes menggunakan sistem pencatatan yang standar (digital) untuk mempermudah pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM), yang merupakan prasyarat utama penilaian akreditasi.
4	Peningkatan kualitas laboratorium	Standardisasi Mutu dan Akreditasi	Memastikan Laboratorium Kesehatan terakreditasi Standar Nasional Kesehatan (<i>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi</i>)
			Menyusun SOP, Petunjuk Teknis dan pedoman teknis.
			Pendampingan implementasi standar mutu.
			Monitoring Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang disusun di Laboratorium Kesehatan.
			Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Monev capaian standar mutu, Penilaian risiko laboratorium (<i>laboratory risk assessment</i>).
		Penguatan Infrastruktur & Teknologi	Penguatan Infrastruktur Laboratorium Kesehatan dengan menyediakan atau mengusulkan pengadaan alat laboratorium sesuai standar.
			Pemetaan kebutuhan dan pengembangan infrastruktur BSL-2 untuk standard Laboratorium Kesehatan Tingkat 2 (<i>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</i>).

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			<i>NOMOR HK.01.07/MENKES/1801/2024. TENTANG STANDAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT).</i>
			Evaluasi kelayakan bangunan agar memenuhi standar keselamatan, alur kerja, dan biosafety.
		Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan kompetensi tenaga laboratorium (biosafety & biosecurity, teknik PCR, kultur, pengujian air & pangan, quality assurance).
			Pembinaan pengendalian mutu internal (PMI) dan eksternal (PME).
			Mengidentifikasi kebutuhan tenaga laboratorium Kesehatan sesuai Standar Ketenagaan Minimal
			Menyelenggarakan atau memfasilitasi pelatihan teknis
			Mengirim SDM mengikuti pelatihan yang diadakan Kemenkes, Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK), dan lembaga kompetensi lainnya.
		Jaminan Ketersediaan Reagensia & Kontrol	Menjamin ketersediaan reagensia, bahan habis pakai, dan bahan kontrol mutu secara rutin dan tepat waktu, melalui sistem manajemen logistik yang efisien dan transparan.
5	Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Peningkatan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Terintegrasi dan Terstandar.	Fokus pada penguatan Puskesmas (sebagai FKTP utama) agar memenuhi standar akreditasi dan ketersediaan sumber daya, sarana dan prasaranan, dan alat kesehatan sehingga mampu melayani peserta JKN dengan kualitas terbaik di lini pertama. Memperkuat puskesmas sebagai FKTP dalam menjalankan ANC terpadu sesuai standar JKN, yaitu skrining dini kasus resiko tinggi kehamilan, seperti preklamsi dan diabetes gestational
		Penguatan Sistem Rujukan dan Ketersediaan Layanan Spesialistik yang Bermutu di Fasilitas	Fokus pada pemenuhan kapasitas Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kelas C dan D agar memiliki sarana, prasarana, dan SDM sesuai standar kelasnya untuk mendukung sistem

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) milik Daerah.	rujukan JKN yang efektif. Pemenuhan Kasitas SDM, Sarana dan Prasarana untuk RSUD Kelas B agar optimal dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Memastikan RSUD memiliki layanan PONEK sesuai standar dan regulasi terbaru, dan dapat melayani rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal dengan SDM spesialis 24 jam.
		Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan JKN Berbasis Bukti.	Fokus pada implementasi Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (termasuk BLUD) untuk menjamin data klaim, mutu layanan, dan pengelolaan finansial JKN berjalan transparan dan efektif serta optimalisasi Mobile JKN.
		Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif yang Menjadi Pilar Utama Program Jaminan Kesehatan Nasional.	Fokus pada perluasan dan penguatan program UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) di FKTP, seperti skrining kesehatan, Posbindu, dan edukasi, untuk mengurangi angka kesakitan dan menekan biaya layanan kuratif JKN. Meningkatkan cakupan skrining kesehatan ibu hamil dan bayi melalui posyandu menjadi bagian preventif untuk menurunkan AKI, AKB
6	Digitalisasi layanan kesehatan	Penguatan Infrastruktur Digital dan Ekosistem Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Terintegrasi.	Menjamin ketersediaan, stabilitas, dan keamanan jaringan, perangkat keras, serta platform digital di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) tingkat pertama dan rujukan.
		Transformasi Pelayanan dan Pengembangan Layanan Kesehatan Digital (Telemedicine dan Rekam Medis Elektronik).	Mendorong pemanfaatan teknologi secara langsung untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan klinis bagi masyarakat.
7	Meningkatkan rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk	Pemerataan dan Akses Fasyankes Primer	Meningkatkan jangkauan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan primer melalui pembangunan/penambahan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan/atau optimalisasi Polindes di

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			wilayah yang belum terlayani (unserved) atau kurang terlayani (underserved), berdasarkan standar Rasio Puskesmas terhadap Penduduk/Wilayah. Prioritas pembanguna Puskesmas atau pustu baru di wilayah dengan angka kematian atau akses terburuk untuk pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi, untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan Ibu dan Anak seperti ANC dan persalinan normal.
		Peningkatan Kapasitas Fisik & Non-Fisik	Menjamin ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (Alkes) yang sesuai standar di setiap Puskesmas dan jejaringnya (Pustu) seiring dengan peningkatan jumlah unit Puskesmas.
		Legalitas dan Kepatuhan	Mempercepat proses perizinan dan akreditasi Puskesmas baru/yang direhabilitasi, serta memastikan setiap Puskesmas beroperasi sesuai dengan standar fungsi, klasifikasi, dan ketentuan operasional yang berlaku.
		Dukungan SDM Kesehatan	Mengusulkan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten secara merata di Puskesmas, khususnya 11 (sebelas) jenis tenaga kesehatan esensial, sejalan dengan peningkatan rasio jumlah Puskesmas kepada Pemerintah Daerah.
8	Meningkatkan rasio dokter dan tenaga kesehatan lainnya terhadap jumlah penduduk	Pemerataan dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Menekankan pada pemenuhan rencana kebutuhan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan (seperti 11 jenis nakes di Puskesmas dan Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit) dan distribusi yang merata, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Fokus pada peningkatan kualifikasi, keahlian spesialis, dan sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis agar

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan.	layanan yang diberikan berkualitas, termasuk melalui pelatihan dan beasiswa melalui dukungan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan RI.
		Penyediaan Insentif dan Jaminan Karir untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Retensi SDM di Daerah.	Menghilangkan disparitas kesejahteraan dan menyediakan jalur karir yang jelas untuk menarik dan mempertahankan dokter, dokter gigi, dan nakes agar betah bekerja di wilayah Kabupaten Lombok Tengah
		Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Lulusan Baru (Nakes Baru) Melalui Rekrutmen dan Penempatan yang Tepat Sasaran.	Memastikan proses pengangkatan (rekrutmen) dan penempatan nakes, baik PNS, PPPK, maupun tenaga kontrak daerah, berjalan efisien dan berbasis kebutuhan sesuai dengan peta jabatan difasilitas pelayanan kesehatan.
9	Pemberian Insentif Tenaga Medis Non ASN	Peningkatan Ketersediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Kompeten di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah.	memastikan bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis di daerah terutama di daerah pedesaan dan terpencil di masing-masing fasyankes mendapatkan insentif yang memadai.
		Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan melalui Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.	menghubungkan pemberian insentif dengan standar kinerja (Key Performance Indicator/KPI) dan mutu layanan yang harus dicapai oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan Non-ASN.
		Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Non-ASN Berbasis Insentif Kinerja.	menjamin insentif diberikan secara proporsional berdasarkan kontribusi pada pelatihan, sertifikasi, kinerja pegawai atau kompetensi spesifik yang dibutuhkan daerah.
10	Jaminan Sosial dan Kesehatan untuk tenaga medis Non ASN	Penguatan Regulasi dan Basis Data Tenaga Kesehatan Non-ASN	Penyusunan regulasi dan penetapan standar Tenaga Kesehatan (Nakes) Non-ASN daerah yang berhak mendapatkan jaminan sosial.
		Optimalisasi Anggaran untuk Fasilitasi Jaminan Sosial dan Kesehatan	Pengalokasian dan pengoptimalan anggaran daerah (APBD) secara berkelanjutan untuk subsidi iuran Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan Nakes Non-ASN.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Hidup Nakes Non-ASN	Peningkatan akses Nakes Non-ASN terhadap program peningkatan kapasitas (pelatihan) dan perlindungan kesehatan ketenagakerjaan.
11	Jaminan Kesehatan Tuan Guru dan Pemuka Agama Lainnya	Optimalisasi Penetapan dan Validasi Data Peserta Khusus	Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait (Kemenag, Kesra, Dinas Sosial, Bagian Keagamaan) untuk memastikan seluruh Tuan Guru dan Pemuka Agama terdata akurat dan didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan (PBI Daerah) tanpa terkendala status domisili/pekerjaan.
		Penjaminan Keberlanjutan Iuran dan Status Kepesertaan.	Menetapkan mekanisme anggaran yang pasti dan berkelanjutan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi kelompok ini (PBI Daerah) selama 5 tahun periode Renstra, mencegah tunggakan yang mengakibatkan putusnya layanan.
		Penyediaan Program Skrining dan Deteksi Dini Penyakit Prioritas bagi Pemuka Agama.	Mengembangkan program promotif-preventif yang spesifik (misalnya: medical check-up gratis/bersubsidi berkala) di Puskesmas untuk mendeteksi dini penyakit degeneratif (Diabetes, Hipertensi, Jantung) yang sering dialami oleh kelompok usia lanjut/produktif.
12	Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Penguatan Kapasitas SDM Fasyankes Primer dan Sekunder	peningkatan kompetensi klinis dan manajerial SDM di Puskesmas, Rumah Sakit Kelas B/C/D, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar akreditasi dan Indikator Nasional Mutu (INM). Pelatihah Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Bag Seluruh TIM kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas dan RSUD, Sertifikasi bidan dalam asuhan persalina normal (APN) dan konselor menyusui
		Pemerataan Distribusi dan Insentif	Menerapkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong pemerataan penempatan tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter gigi, nakes 11 jenis) di wilayah pedesaan dan terpencil di Fasilitas Kesehatan yang memiliki kekurangan SDM Kesehatan.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan	Mengembangkan sistem pelatihan berbasis e-learning dan blended learning serta pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi untuk mendukung pengembangan karir dan sertifikasi tenaga kesehatan dan tenaga medis secara efisien dan efisien.
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan:	Memastikan tenaga kesehatan yang menangani program prioritas daerah (seperti stunting, sanitasi, dan pengendalian penyakit) memiliki kompetensi khusus yang tersertifikasi.
13	Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar layanan	Penyusunan dan Pembaruan Data Kebutuhan Alat Kesehatan (Alkes) Berbasis Analisis Beban Kerja dan Standar Fasyankes.	Menekankan pentingnya perencanaan berbasis data untuk memastikan pengadaan Alkes benar-benar sesuai dengan jenis pelayanan (UKM/UKP), kelas Rumah Sakit (B/C/D), dan Standar Nasional yang berlaku dan tertuang dalam aplikasi ASPAK.
		Peningkatan Alokasi Anggaran dan Mekanisme Pengadaan Alkes Prioritas untuk Layanan Esensial.	Memastikan ketersediaan dana (termasuk dana BLUD dan DAK) difokuskan pada Alkes yang kritis untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penurunan Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB). Pengupayaan pengadaan pemenuhan Alkes untuk menurunkan AKI, AKB seperti USG, resusitasi kit neonatal termasuk di dalamnya ada Suction, C-PAP yang sangat dibutuhkan untuk merujuk bayi baru lahir dan ambulans gawad darurat yang terstandar NETS.
		Penerapan Sistem Pengelolaan Alkes (Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Kalibrasi) Terintegrasi dan Berkelanjutan.	Kebijakan ini tidak hanya fokus pada pengadaan, tetapi juga pemeliharaan (preventif dan korektif) serta kalibrasi Alkes secara rutin untuk menjamin Alkes selalu dalam kondisi siap pakai (layak fungsi) dan aman bagi pasien.
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dalam Pengoperasian dan	Kebijakan ini menekankan bahwa Alkes yang lengkap harus didukung oleh SDM yang kompeten. Ini mencakup

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Pemeliharaan Alkes Berteknologi Tinggi.	pelatihan bagi teknisi elektromedis dan tenaga klinis pengguna Alkes.
14	Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan	Penguatan Sistem Perencanaan dan Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan (Perbekkes) yang Terintegrasi dan Berbasis Kebutuhan Riil.	Peningkatan akurasi perencanaan (metode konsumsi dan morbiditas) untuk menjamin ketersediaan obat esensial dan buffer stock di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), terutama Puskesmas. Mencegah kekosongan dan penumpukan stok.
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Sediaan Farmasi serta Perbekkes melalui Pengendalian dan Pengawasan Distribusi.	Penjaminan mutu obat mulai dari pengadaan (melalui e-katalog/Daftar Obat Esensial Nasional/DOEN), penyimpanan (sesuai Cara Penyimpanan Obat yang Baik/CPOB), hingga pengawasan terhadap peredaran ilegal atau kadaluarsa.
		Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Obat dan Perbekkes melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Mengimplementasikan sistem informasi logistik dan manajemen obat terpadu (seperti e-Monev Obat atau Sistem Informasi Manajemen Instalasi Farmasi) untuk memantau stok, distribusi, dan penggunaan secara real-time.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Uraian Program

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (INMEN) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedomanan Peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 uraian program Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program 1,2,3 dan 4 merupakan program yang berujuan untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sedangkan program ke 5 merupakan program pendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional Dinas Kesehatan. Indikator dan target ke 5 (lima) program diatas tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Program Dinas Kesehatan Tahun 2026-2030

PROGRAM/OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Prog. 1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
Outc. 1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat									
		Jumlah kematian ibu	Kasus	23	21	19	17	16	15	KESMAS-KESGA
		Jumlah kematian balita	Kasus	120	118	116	114	112	110	KESMAS-KESGA
		Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	20	17	14	12	11	10	KESMAS-GIZI
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen	5%	10%	15%	20%	25%	25%	KESMAS-PROMKES
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3KL-KESLING
		Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	Persen	60%	59%	58%	57%	56%	55%	P3KL-P2
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	YANKES-MUTU
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Persen	81%	82%	84%	86%	88%	90%	YANKES-MUTU
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	Persen	49,8%	50%	55%	60%	65%	70%	P3KL-KESLING

PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persen	29%	32%	34%	36%	38%	40%	SDK-YANKES
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Persen	74%	75%	76%	78%	80%	82%	YANKES-MUTU
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	98%	100%	100%	100%	100%	100%	YANKES-MUTU
	Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri	Persen	90,8%	91%	92%	93%	94%	95%	KESMAS-KESGA
	Persentase Merokok Penduduk 10-21 tahun	Persen	14,2%	14.40%	12%	11.50%	11%	10%	P3KL-P2
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persern	90%	90%	90%	90%	90%	90%	P3KL-P2
	Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	64.30	66.10	67.90	67.70	72	75	KESMAS-PROMKES
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KESMAS-KESGA
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KESMAS-KESGA
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KESMAS-KESGA

PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Baru Lahir Sesuai Standar								
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KESMAS-GIZI
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KESMAS-KESGA
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KESMAS-KESGA
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KESMAS-KESGA
		Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3KL-P2
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3KL-P2
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3KL-P2

PROGRAM/OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3KL-P2
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3KL-P2
		Indeks Kepuasan Masyarakat – RSUD	Persen	83	85	85.5	86	86.5	87	YANKES-RSUD
Prog. 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia									
Outc. 2	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	82%	85%	90%	100%	100%	100%	SDK
		Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Persen	6:1000	6:1000	6:1000	6:1000	6:1000	6:1000	SDK
Prog. 3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman									
Outc. 3	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	85	88	89	90	91	92	SDK

PROGRAM/OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan Makan Minuman									
Prog. 4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									
Outc. 4	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	81	82	83	85	87	90	KESMAS-PROMKES
Prog. 5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a									
Outc. 5	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pencapaian IKU Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT - PERENCANAAN
		Pencapaian RS Pendidikan	Status	Terakreditasi Satelit FK UNRAM	Terakreditasi Satelit FK UNIZAR	-	-	Terakreditasi Utama FK UNIV BUMIGORA	-	YANKES-RSUD

B. Uraian Kegiatan

Berdasarkan uraian program diatas, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah. Pemilihan kegiatan yang digunakan pada Rencana Strategis (Renstra) Dina Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
6. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
8. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
9. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

14. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
16. Administrasi Umum Perangkat Daerah
17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19. Peningkatan Pelayanan BLUD

Tabel 4. 2 Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGE TAHUN						KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
K1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keterpenuhan SPA di ASPAK - Puskesmas	Persen	80	82	84	86	88	90	YANKES-KESTRAD
		Cakupan Keterpenuhan SPA di ASPAK - RSUD	Persen	89,7	89,8	89,85	89,9	90	90,05	RSUD
		Jumlah Fasyankes (Puskesmas/Pustu/Polindes) yang Selesai Dibangun/Direhabilitasi.	Unit	13	4	4	4	4	4	SEKRETARIAT-PERENCANAAN
		Jumlah Layanan yang di Kembangkan di Rumah Sakit	Unit		4	3	2	2	1	RSUD
K2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Penerima PKG	Persen	30	40	55	61	70	75	KESMAS-PROMKES
		Persentase Gerai Santri Sehat	Persen	22	22,52	45,05	67,57	90	100	KESMAS-PROMKES
K3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi									
	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persen		100	100	100	100	100	SDK-LITBANKES
		Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Unit	29	29	30	30	30	30	SDK-LITBANKES
K4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Persentase Rumah Sakit Kelas C/D dan Fasyankes yang Memenuhi Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan.	Persen	100	100	100	100	100	100	YANKES-MUTU
		Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Unit	31	31	31	32	32	32	YANKES-KESTRAD
K5	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga yang Penyelesaian Angka Kredit Fungsional sesuai periode	Persen	95	96	97	98	99	100	SEKRETARIAT-UMPEG

KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGE TAHUN						KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
K6	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang di Tingkatkan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	75	80	85	90	95	100	SDK
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang di Tingkatkan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	150	200	250	300	SDK
K7	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Berizin	Persen	100	100	100	100	100	100	DIKES-FARMASI
K8	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang di Terbitkan	Persen	65	70	75	80	85	90	P3KL-KESLING
K9	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	KESMAS-PROMKES
K10	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kegiatan Promotif Preventif yang dilaksanakan	Kegiatan	100	100	100	100	100	100	KESMAS-PROMKES
K11	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persen	100	100	100	100	100	100	KESMAS-PROMKES

KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGE TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
K12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tetap waktu dan sesuai ketentuan	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	SEKRETARIAT-PERENCANAAN
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT-PERENCANAAN
K13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	SEKRETARIAT-KEUANGAN
		Persentase penyerapan anggaran perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT-KEUANGAN
K14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah	Laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT-UMPEG
		Persentase validasi data aset Perangkat Daerah								SEKRETARIAT-UMPEG
K15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	Laporan	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT-UMPEG
		Laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT-UMPEG
K16	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Terlaksananya manajemen administrasi umum	Laporan administrasi Umum	Laporan	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT-UMPEG
		Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP								
K17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan	Laporan	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT-UMPEG
		Persentase pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang didukung oleh jasa penunjang	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT-UMPEG
K18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah BMD kondisi baik	Unit	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT-UMPEG
		Persentase BMD kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT-UMPEG
K19	Peningkatan Pelayanan BLUD									

KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGE TAHUN						KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pada BLUD	Persentase Tingkat Layanan BLUD	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT- PERENCANAAN
		Jumlah Layanan Kesehatan yang Tersedia di Puskesmas	Unit	31	31	31	31	31	31	DIKES
		Jumlah Layanan Kesehatan yang Tersedia di Labkesmas	Layanan	1	1	1	1	1	1	DIKES
		Indeks Kepuasan Masyarakat - Puskesmas	Indeks	81	82	84	86	88	90	DIKES
		Persentase Pemenuhan Instrumen Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas RSUD	Persen		-	WBK	-	WBBM		RSUD

C. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapaun uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Uraian Subkegiatan , Indikator dan Pagu Indikatif Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Daerah

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	
1.02.02.2.01.000 1	Sub k 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya										
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
1.02.02.2.01.000 2	Sub k 2	Pembangunan Puskesmas										
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	3	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
1.02.02.2.01.000 4	Sub k 3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	2	1	1	0	1	0	1	SEKRETARIAT
1.02.02.2.01.000 6	Sub k 4	Pengembangan Puskesmas										
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	0	1	0	0	1	SEKRETARIAT
1.02.02.2.01.000 7	Sub k 5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	14	4	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
1.02.02.2.01.000 8	Sub k 6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit										
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT & RSUD
1.02.02.2.01.000 3	Sub k 7	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
1.02.02.2.01.001 0	Sub k 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT & RSUD
1.02.02.2.01.001 1	Sub k 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT & RSUD
1.02.02.2.01.001 4	Sub k 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	10	10	10	10	10	10	SEKRETARIAT & RSUD
1.02.02.2.01.001 5	Sub k 11	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	0	0	1	1	1	1	1	RSUD
1.02.02.2.01.002 0	Sub k 12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	10	5	484	498	523	528	559	SEKRETARIAT & RSUD
1.02.02.2.01.002 2	Sub k 13	Pengembangan Rumah Sakit										
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	RSUD

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
		rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit									
1.02.02.2.01.002 3	Sub k 14	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	30	30	30	31	32	32	32	FARMASI + RSUD
1.02.02.2.01.002 6	Sub k 15	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan										
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	29	30	30	31	32	32	32	FARMASI
1.02.02.2.02.000 1	Sub k 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14871	16914	17211	18072	18975	19924	20920	KESGA
1.02.02.2.02.000 2	Sub k 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14501	16145	16428	17249	18112	19017	19968	KESGA
1.02.02.2.02.000 3	Sub k 18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14959	15376	15646	16428	17250	18112	19018	KESGA
1.02.02.2.02.000 4	Sub k 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	77555	90833	82652	86785	91124	95680	100464	GIZI
1.02.02.2.02.0005	Sub k 20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	135651	175000	178506	187431	196803	206643	216975	KESGA
1.02.02.2.02.0006	Sub k 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	519269	730000	742827	779968	818967	859915	902911	KESGA
1.02.02.2.02.0007	Sub k 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	88674	109000	109185	114644	120376	126395	132715	KESGA
1.02.02.2.02.0008	Sub k 23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	46099	52282	52382	55001	57751	60639	63671	P2
1.02.02.2.02.0009	Sub k 24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11032	11413	11420	11991	12591	13220	13881	P2
1.02.02.2.02.0010	Sub k 25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1910	2373	18156	19064	20017	21018	22069	PROMKES
1.02.02.2.02.0011	Sub k 26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	14987	15379	18156	15778	14089	12809	11829	P2
1.02.02.2.02.001 2	Sub k 27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	18702	20000	27960	29358	30826	32367	33986	P2
1.02.02.2.02.001 5	Sub k 28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	GIZI
			Persentase Underweight	Persen	16%	15,1%	15%	14%	13%	12%	11%	GIZI
			Persentase Wasting	Persen	10%	9,0%	8%	7,30%	7%	6,50%	5%	GIZI
			Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk	Kasus	48	45	40	30	20	10	0	GIZI
1.02.02.2.02.001 6	Sub k 29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	PROMKES
1.02.02.2.02.001 7	Sub k 30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	KESGA
1.02.02.2.02.001 8	Sub k 31	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokume n	2	2	2	2	2	2	2	PROMKES
1.02.02.2.02.001 9	Sub k 32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	KESTRAD

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.02.02.2.02.002 0	Sub k 33	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	SURVEILANS
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisi Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SURVEILANS
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SURVEILANS
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko KLB	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SURVEILANS
			Persentase kewaspadaan dini dan atau penanggulangan KLB/ Bencana kurang dari 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SURVEILANS
			AFP/Sus Polio KLB	Rasio	3/100.00 0	3/100.00 0	3/100.00 0	3/100.00 0	3/100.00 0	3/100.00 0	3/100.00 0	SURVEILANS
			AFP/Sus Polio Tidak KLB	Rasio	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	SURVEILANS
			Suspek Campak	Rasio	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	2/100.00 0	SURVEILANS
1.02.02.2.02.002 1	Sub k 34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1910	2000	2379	2379	2379	2379	2379	PROMKES
1.02.02.2.02.002 5	Sub k 35	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokume n	14	14	14	14	14	14	14	P2
1.02.02.2.02.002 6	Sub k 36	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	JKN MUTU
			Persentase Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional			80%	80%	80%	80%	80%	80%	JKN MUTU

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase Kepesertaan Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional			8,54%	8,7%	8,87%	9,05%	9,23%	9,41%	JKN MUTU
1.02.02.2.02.002 8	Sub k 37	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional										
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Spesime n	50	60	64	70	76	82	84	SURVEILANS
1.02.02.2.02.003 3	Sub k 38	Operasional Pelayanan Puskesmas										
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokume n	29	29	29	30	30	30	30	PUSKESMAS
1.02.02.2.02.003 4	Sub k 39	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
1.02.02.2.02.003 5	Sub k 40	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota										
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	0	0	1	1	1	1	1	MUTU + RSUD
1.02.02.2.02.003 6	Sub k 41	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	SURVEILANS
1.02.02.2.02.003 8	Sub k 42	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	34	34	34	34	34	34	34	RUJUKAN

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.02.02.2.02.004 0	Sub k 43	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1434	1434	3736	3884	3246	2636	2434	P2
1.02.02.2.02.004 1	Sub k 44	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	208	208	208	208	208	208	208	P2
1.02.02.2.02.004 2	Sub k 45	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria										
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	657	2924	2924	2924	2924	2427	2427	P2
1.02.02.2.02.004 4	Sub k 46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	KESGA
1.02.02.2.02.004 6	Sub k 47	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	KESGA
			Cakupan Antenatal Care sesuai Standar (ANC 6 kali)	Persen		80%	82%	85%	88%	90%	92%	KESGA
			Cakupan Persalinan Di fasilitas Kesehatan sesuai Standar	Persen		88%	89%	90%	91%	92%	93%	KESGA
			Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan Nifas lengkap	Persen		88%	89%	90%	91%	92%	93%	KESGA
			Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap	Persen		91%	92%	93%	94%	95%	96%	KESGA
			Cakupan Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangnya	Persen		50%	55%	60%	65%	70%	75%	KESGA
1.02.02.2.02.004 7	Sub k 48	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan										

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	KESGA
1.02.02.2.02.0048	Subk 49	Pengelolaan Layanan Imunisasi										
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	P2
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	P2
1.02.02.2.03.0002	Subk 50	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	SILITBANKES
1.02.02.2.04.0003	Subk 51	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	29	29	29	29	29	29	29	MUTU
1.02.03.2.02.0003	Subk 52	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	SDMK
			Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	Persen	96.11	97	100	100	100	100	100	SDMK
			Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	Persen	78	80	100	100	100	100	100	SDMK
	Subk 53	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	2484	2484	2484	2484	2484	2484	2484	SDMK
1.02.03.2.03.0001	Subk 54	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100	100	200	200	200	200	200	SDMK+RSUD
1.02.04.2.01.000 1	Sub k 55	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokume n	1		1	1	1	1	1	FARMASI
1.02.04.2.03.000 1	Sub k 56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	KESLING
1.02.05.2.01.000 1	Sub k 57	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	PROMKES

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.02.05.2.02.000 1	Sub k 58	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	PROMKES
1.02.05.2.03.000 1	Sub k 59	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	PROMKES
X.XX.01.2.01.000 1	Sub k 60	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	2	2	2	2	2	2	2	PERENCANAA N
X.XX.01.2.01.000 2	Sub k 61	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokume n	3	3	3	3	3	3	3	PERENCANAA N
X.XX.01.2.01.000 4	Sub k 62	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokume n	3	3	3	3	3	3	3	PERENCANAA N
X.XX.01.2.01.000 6	Sub k 63	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	PERENCANAA N
X.XX.01.2.01.000 7	Sub k 64	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	PERENCANAA N

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
X.XX.01.2.01.0010	Sub k 65	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	1	1	1	1	PERENCANAAN
X.XX.01.2.02.0001	Sub k 66	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24094	24094	24094	24094	24094	24094	24094	KEUANGAN
X.XX.01.2.02.0005	Sub k 67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	KEUANGAN
X.XX.01.2.02.0007	Sub k 68	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	KEUANGAN
X.XX.01.2.03.0005	Sub k 69	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	UMPEG
X.XX.01.2.05.0003	Sub k 70	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	UMPEG

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
X.XX.01.2.05.000 5	Sub k 71	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	UMPEG
X.XX.01.2.06.000 2	Sub k 72	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	UMPEG
X.XX.01.2.06.000 3	Sub k 73	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	UMPEG
X.XX.01.2.06.000 4	Sub k 74	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	UMPEG
X.XX.01.2.06.000 9	Sub k 75	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	UMPEG
X.XX.01.2.06.001 1	Sub k 76	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	PERENCANAAN + UMPEG
X.XX.01.2.08.000 2	Sub k 77	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	KEUANGAN
X.XX.01.2.08.000 4	Sub k 78	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	UMPEG
X.XX.01.2.09.000 2	Sub k 79	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

KODE	SUBKEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN					KET.
							2026	2027	2028	2029	2030	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan	120	120	120	120	120	120	120	UMPEG
X.XX.01.2.10.000 1	Sub k 80	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	31	31	31	32	32	32	32	SEKRETARIAT

D. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.4 berikut. Indikator kinerja dimaksud menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72.48	73.17	73.86	74.54	75.23	75.91	DIKES
2	Persentase Penurunan Kematian Ibu	Persen	4,2	8,7	9,5	10,5	5,9	6,3	KESMAS-KESGA
3	Persentase Penurunan Kematian Balita	Persen	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	KESMAS-KESGA
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90	90	90	90	90	90	P3KL-P2
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99.03	99.05	99.08	99.10	99.13	99.15	YANKES
6	Nilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,21	80,71	82,4	84,09	85,78	87,47	SEKRETARIAT

Selanjutnya Indikator Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertera pada tabel 4.4 dioperasionalkan pencapaiannya oleh bidang-bidang yang terdapat dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan dan diukur melalui indikator kinerja program. Definisi operasional dan perhtiungan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Definisi Operasional dan Perhitungan Pencapaian IKU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	Rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan kondisi mortalitas (kematian) pada suatu waktu dan wilayah tertentu.	$UHH = \frac{\text{Jumlah total tahun yang diharapkan hidup oleh semua orang}}{\text{Jumlah orang pada awal periode (penduduk)}}$	BPS
	Meningkatkan Kualitas Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Penurunan Kematian Ibu	Penurunan jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan nifas selama periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan perbedaan persentase antara Jumlah Kematian Ibu pada periode awal dan akhir dibandingkan dengan Jumlah Kematian Ibu awal.	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Tahun Sebelumnya (N - 1)} - \text{Jumlah Kematian Ibu Tahun Perhitungan (N)}}{\text{Jumlah Kematian Ibu Tahun Sebelumnya (N - 1)}}$	KESMAS
		Persentase Penurunan Kematian Balita	Penurunan jumlah kematian Balita akibat kehamilan, persalinan, dan nifas selama periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan perbedaan persentase antara Jumlah Kematian Ibu pada periode awal dan akhir dibandingkan	$\frac{\text{Jumlah Kematian Balita Tahun Sebelumnya (N - 1)} - \text{Jumlah Kematian Balita Tahun Perhitungan (N)}}{\text{Jumlah Kematian Balita Tahun Sebelumnya (N - 1)}} \times 100\%$	KESMAS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			dengan Jumlah Kematian Balita awal.		
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada wilayah dan periode tertentu.	$\frac{\text{Jumlah Peserta JKN yang terdaftar pada tersebut}}{\text{Jumlah Penduduk tahun tersebut}} \times 100\%$	Yankes
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	persentase jumlah total pasien tuberkulosis yang sembuh atau menyelesaikan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah pasien yang sembuh} + \text{jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan}}{\text{Jumlah total kasus TB yang diobati dan dilaporkan}} \times 100\%$	P3KL

E. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran utama untuk menilai efektivitas dan capaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. IKK ini mencerminkan prioritas pembangunan kesehatan daerah dan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui indikator seperti cakupan imunisasi dasar lengkap, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis, cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan penurunan prevalensi stunting balita.

Melalui pencapaian target IKK yang terukur, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu menunjukkan akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta mendorong perbaikan layanan publik secara berkelanjutan. Penetapan target tersebut mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan kondisi aktual daerah, sehingga setiap capaian menjadi dasar untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Adapapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	23	21	19	17	16	15	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	20	17	14	12	11	10	
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/stakeholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *good governace* atau pemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dalam Urusan Wajib Bidang Kesehatan menjabarkan 5 (lima) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/subkegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan pertan serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan tujuan dan sasaran RPJMD.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Harapan kedepan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar :
- i. Kualitas Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat semakin meningkat.
 - j. Terjadi penurunan Angka Kesakita, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
 - k. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dapat ditingkatkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara paripurna.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kesakitan di Kabupaten Lombok Tengah agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *good governace* antar lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Mssyarakat dan Stakeholder, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

Praya, 7 Nopember 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah



D. N. SUARDI, SKM., MPH

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 197212311995031007

Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
Kesehatan Untuk Semua					Usia Harapan Hidup			
	T1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup			
			S1	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian				
					Persentase Penurunan Kematian Ibu			
					Persentase Penurunan Kematian Balita			
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)			
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional			
				P1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DIKES + RSUD
					Jumlah Kematian Balita			
					Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)			
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun			
					Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		DIKES	
					Prevalensi Obesitas > 18 Tahun			
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
					Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan			
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat			
					Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna		
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar		
						Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri		
						Persentase Merokok Penduduk 10-21 tahun		
						Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)		
						Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)		
						Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)		
						Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		
						Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		
						Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar		
						Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasarsesuai standar		
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar		
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
						Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar		
						Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		
					Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar		
					Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar		
					Indeks Kepuasan Masyarakat - RSUD		RSUD
			K1	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keterpenuhan SPA di ASPAK - Puskesmas	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DIKES
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			RSUD
					Cakupan Keterpenuhan SPA di ASPAK - RSUD		DIKES
					Jumlah Fasyankes (Puskesmas/Pustu/Polindes) yang Selesai Dibangun/Direhabilitasi.		
					Jumlah Layanan yang di Kembangkan di Rumah Sakit		RSUD
			Sub K - 1	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	DIKES
			Sub K - 2	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Pembangunan Puskesmas	DIKES
			Sub K - 3	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	DIKES
			Sub K - 4	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
				Sub K - 5	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DIKES
				Sub K - 6	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	DIKES
				Sub K - 7	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD
				Sub K - 8	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DIKES
				Sub K - 9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD
				Sub K - 10	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DIKES + RSUD
				Sub K - 11	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	RSUD
				Sub K - 12	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DIKES + RSUD
				Sub K - 13	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	Pengembangan Rumah Sakit	DIKES + RSUD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
			Sub K - 14	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DIKES + RSUD
			Sub K - 15	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DIKES
			K2	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DIKES + RSUD
				Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Penerima PKG		
					Persentase Gerai Santri Sehat		
			Sub K - 16	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DIKES
			Sub K - 17	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DIKES
			Sub K - 18	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DIKES
			Sub K - 19	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DIKES
			Sub K - 20	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DIKES
			Sub K - 21	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DIKES
			Sub K - 22	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DIKES
			Sub K - 23	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Sub K - 24	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DIKES
			Sub K - 25	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DIKES
			Sub K - 26	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DIKES
			Sub K - 27	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DIKES
			Sub K - 28	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DIKES
			Sub K - 29	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DIKES
			Sub K - 30	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DIKES
			Sub K - 31	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DIKES
			Sub K - 32	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	DIKES
			Sub K - 33	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DIKES
			Sub K - 34	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	DIKES
			Sub K - 35	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
				Sub K - 36	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DIKES
				Sub K - 37	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	DIKES
				Sub K - 38	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	
				Sub K - 39	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DIKES
				Sub K - 40	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DIKES + RSUD
				Sub K - 41	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DIKES
				Sub K - 42	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DIKES
				Sub K - 43	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	DIKES
				Sub K - 44	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	DIKES
				Sub K - 45	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	DIKES
				Sub K - 46	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DIKES
				Sub K - 47	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Sub K - 48	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	DIKES
				Sub K - 49	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	DIKES
				K3	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	DIKES
					Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
						Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
				Sub K - 50	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DIKES
				K4	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DIKES
						Persentase Rumah Sakit Kelas C/D dan Fasyankes yang Memenuhi Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan.		
						Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Sub K - 51	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DIKES
				P2	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	DIKES + RSUD
						Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
				K5	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	DIKES
				Sub K - 52	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DIKES
						Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar		
						Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar		
				Sub K - 53	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
				K6	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DIKES + RSUD
				Sub K - 54	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DIKES + RSUD
				P3	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DIKES
				K7	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Berizin	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DIKES
				Sub K - 55	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
				K8	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang di Terbitkan	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DIKES
				Sub K - 56	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DIKES
				P4	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DIKES
				K9	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DIKES
				Sub K - 57	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DIKES
				K10	Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Promotif Preventif yang dilaksanakan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DIKES
				Sub K - 58	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DIKES
				K11	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub K - 59	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DIKES
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	S2		Nilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah		DIKES
			P5	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DIKES + RSUD
					Rumah Sakit Pendidikan		RSUD
			K12	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIKES + RSUD
			Sub K - 60	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIKES + RSUD
			Sub K - 61	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DIKES
			Sub K - 62	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIKES
			Sub K - 63	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DIKES + RSUD
			Sub K - 64	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Sub K - 65	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIKES + RSUD
			K13	Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIKES + RSUD
			Sub K - 66	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIKES + RSUD
			Sub K - 67	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIKES
			Sub K - 68	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DIKES + RSUD
			K14	Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah	Laporan administrasi barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIKES
			Sub K - 69	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIKES
			K15	Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIKES
			Sub K - 70	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DIKES
			Sub K - 71	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIKES
			K16	Terlaksananya manajemen administrasi umum	Laporan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIKES + RSUD
			Sub K - 72	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIKES + RSUD
			Sub K - 73	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIKES

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Sub K - 74	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DIKES + RSUD
			Sub K - 75	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIKES + RSUD
			Sub K - 76	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIKES
			K17	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIKES + RSUD
			Sub K - 77	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIKES
			Sub K - 78	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIKES + RSUD
			K18	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah BMD kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIKES
			Sub K - 79	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIKES
			K19	Meningkatnya Kualitas Layanan Pada BLUD	Persentase Tingkat Layanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	DIKES
					Jumlah dan Layanan Kesehatan yang Tersedia di Puskesmas		
					Jumlah dan Layanan Kesehatan yang Tersedia di Labkesmas		RSUD
					Persentase Pemenuhan Instrumen Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas RSUD		
			Sub K - 80	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	DIKES + RSUD

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN								KE T.			
							2026		2027		2028		2029			2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	
			Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Person	90,20 %	100%	100%			100 %				100 %			DIKES	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Person	98,9%	100%	100%			100 %				100 %			DIKES	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Person	82%	100%	100%			100 %				100 %			DIKES	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Person	92%	100%	100%			100 %				100 %			DIKES	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	Person	94%	100%	100%			100 %				100 %			DIKES	
			Indeks Kepuasan Masyarakat - RSUD	Indeks	81,62	83	85			85,5				86,5			RSUD	
1.02.02.2.01	K1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						168.599.320.928		225.427.708.035			232.250.089.542		239.365.267.329		246.757.378.634	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keterpenuhan SPA di ASPAK - Puskesmas	Person	70%	80%	82%			84%			86%		88%		90%	DIKES
			Cakupan Keterpenuhan SPA di ASPAK - RSUD	Person	89,60 %	89,70%	89,80%			89,85%			89,90%		90,00%		90,05%	RSUD
			Jumlah Fasyankes (Puskesmas/Pustu/Polindes) yang Selesai Dibangun/Direhabilitasi.	Unit	4		4			4			4		4			
			Jumlah Layanan yang di Kembangkan di Rumah Sakit	Unit	1		4			3			2		2		1	RSUD
1.02.02.2.01.0001	Subk 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						46.023.011.326		97.714.771.432			98.999.999.998		99.000.000.000		99.000.000.000	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah	Unit	0	0	1			1			1		1			DIKES

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN										KE T.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Penduduk Minimal 1:1000														
1.02.02.2.0 1.0002	Sub k 2	Pembangunan Puskesmas					8.266.628.756		8.266.628.756		8.266.628.756		8.266.628.756		8.266.628.756	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	3	1		1		1		1		1	DIK ES
1.02.02.2.0 1.0004	Sub k 3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		1.610.510.000	
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	2	1	1		0		1		0		1	DIK ES
1.02.02.2.0 1.0006	Sub k 4	Pengembangan Puskesmas														
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	0		1		0		0		1	
1.02.02.2.0 1.0007	Sub k 5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					8.340.227.465		8.507.032.014		8.677.172.654		8.850.716.107		9.027.730.430	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	14	4	1		1		1		1		1	DIK ES
1.02.02.2.0 1.0008	Sub k 6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					602.100.000		662.310.000		728.541.000		801.395.100		881.534.610	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	1	1		1		1		1		1	RSU D
1.02.02.2.0 1.0003	Sub k 7	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	1	1		1		1		1		1	DIK ES
1.02.02.2.0 1.0010	Sub k 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					6.722.840.960		6.857.297.779		6.994.443.735		7.134.332.609		7.277.019.262	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	1	1		1		1		1		1	DIK ES
1.02.02.2.0 1.0011	Sub k 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KE T.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	1	1	1		1	1		1		1		RSU D	
1.02.02.2.0 1.0014	Sub k 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					44.632.048.965		45.542.907.107		46.472.354.191		48.560.508.218		50.465.175.126		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	10	10		10	10		10		10		DIK ES + RSU D	
1.02.02.2.0 1.0015	Sub k 11	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	0	0	1		1	1		1		1		RSU D	
1.02.02.2.0 1.0020	Sub k 12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					10.336.860.700		10.543.597.914		10.754.469.872		10.969.559.270		11.188.950.455		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	10	5	484		498	523		528		559		DIK ES + RSU D	
1.02.02.2.0 1.0022	Sub k 13	Pengembangan Rumah Sakit					6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan	Unit	1	1	1		1	1		1		1		RSU D	

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KE T.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU		TAR GET	PAGU
			kapasitas pelayanan rumah sakit														
1.02.02.2.0 1.0023	Sub k 14	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					35.137.102.756		38.650.813.032		42.515.894.335		46.767.483.768		51.444.232.145		
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	30	30	30		31		32		32		32		DIK ES + RSU D
1.02.02.2.0 1.0026	Sub k 15	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		56.367.850		
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket	29	30	30		31		32		32		32		DIK ES
1.02.02.2.02	K2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					116.411.853.278		119.281.232.292		122.270.602.516		125.388.624.136		128.644.756.579		DIK ES + RS UD
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Penerima PKG	Perse n	0	30%	40%		55%		61%		70%		70%		
			Persentase Gerai Santri Sehat	Perse n	0%	22%	22,52%		45,05%		67,57%		90,09%		100%		DIK ES
1.02.02.2.0 2.0001	Sub k 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					424.999.800		433.499.796		442.169.792		451.013.188		460.033.452		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14871	16914	17211		18072		18975		19924		20920		DIK ES
1.02.02.2.0 2.0002	Sub k 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					203.452.150		223.797.365		246.177.102		270.794.812		297.874.293		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14501	16145	16428		17249		18112		19017		19968		DIK ES
1.02.02.2.0 2.0003	Sub k 18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					329.927.737		362.920.510		399.212.561		439.133.817		483.047.199		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14959	15376	15646		16428		17250		18112		19018		DIK ES

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN								KE T.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1.02.02.2.0 2.0004	Sub k 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					27.499.890		30.249.879		33.274.867		36.602.354		40.262.589		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	77555	90833	82652		8678 5	-	9112 4	-	95680	-	1004 64	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0005	Sub k 20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					24.992.000		27.491.200		30.240.320		33.264.352		36.590.787		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13565 1	175000	178506		1874 31	-	1968 03	-	206643	-	2169 75	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0006	Sub k 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					27.498.900		30.248.790		33.273.669		36.601.036		40.261.139		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	51926 9	730000	742827		7799 68	-	8189 67	-	859915	-	9029 11	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0007	Sub k 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					43.515.890		47.867.479		52.654.227		57.919.650		63.711.615		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	88674	109000	109185		1146 44	-	1203 76	-	126395	-	1327 15	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0008	Sub k 23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					27.434.000		30.177.400		33.195.140		36.514.654		40.166.119		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	46099	52282	52382		5500 1	-	5775 1	-	60639	-	6367 1	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0009	Sub k 24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					27.406.500		30.147.150		33.161.865		36.478.052		40.125.857		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11032	11413	11420		1199 1	-	1259 1	-	13220	-	1388 1	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0010	Sub k 25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					191.344.000		210.478.400		231.526.240		254.678.864		280.146.750		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1910	2373	18156		1906 4	-	2001 7	-	21018	-	2206 9	-	DIK ES

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN								KET.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
		Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
1.02.02.2.0 2.0020	Sub k 33	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					499.784.498		549.762.948		604.739.243		665.213.167		731.734.484		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Doku men	1	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0021	Sub k 34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					141.435.000		155.578.500		171.136.350		188.249.985		207.074.984		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1910	2000	2379		2379	-	2379	-	2379	-	2379	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0025	Sub k 35	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					83.720.400		92.092.440		101.301.684		111.431.852		122.575.038		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Doku men	14	14	14		14	-	14	-	14	-	14	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0026	Sub k 36	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					103.916.683.037		105.995.016.698		108.114.917.032		110.277.215.373		112.482.759.680		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Doku men	1	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIK ES
			Persentase Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional			80%	80%		80%		80%		80%		80%		
			Persentase Kepesertaan Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional			8,54%	8,7%		8,87%		9,05%		9,23%		9,41%		
1.02.02.2.0 2.0028	Sub k 37	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					224.769.600		247.246.560		271.971.216		299.168.338		329.085.171		
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Spesi men	50	60	64		70	-	76	-	82	-	84	-	DIK ES
1.02.02.2.0 2.0033	Sub k 38	Operasional Pelayanan Puskesmas					4.229.716.860		4.229.716.860		4.229.716.860		4.229.716.860		4.229.716.860		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KE T.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	29	29	29		30	-	30	-	30	-	30	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0034	Subk 39	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					733.920.000		807.312.000		888.043.200		976.847.520		1.074.532.272	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0035	Subk 40	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	0	0	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIKES + RSUD
1.02.02.2.0 2.0036	Subk 41	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	4	4	4		4	-	4	-	4	-	4	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0038	Subk 42	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					829.497.130		912.446.843		1.003.691.527		1.104.060.680		1.214.466.748	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	34	34	34		34	-	34	-	34	-	34	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0040	Subk 43	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					31.972.380		35.169.618		38.686.580		42.555.238		46.810.762	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Orang	1434	1434	3884		3884	-	3884	-	3884	-	3884	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0041	Subk 44	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					54.450.880		59.895.968		65.885.565		72.474.121		79.721.533	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Orang	208	208	208		208	-	208	-	208	-	208	-	DIKES

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN								KET.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
			pelayanan kesehatan sesuai standar														
1.02.02.2.0 2.0042	Subk 45	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					54.850.043		60.335.047		66.368.551		73.005.407		80.305.947		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	657	2924	2924		2924		2924		2427		2427	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0044	Subk 46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					419.200.700		461.120.770		507.232.847		557.956.132		613.751.745		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0046	Subk 47	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					762.731.300		839.004.430		922.904.873		1.015.195.360		1.116.714.896		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIKES
			Cakupan Antenatal Care sesuai Standar (ANC 6 kali)	Person		80%	82%		85%		88%		90%		92%		
			Cakupan Persalinan Di fasilitas Kesehatan sesuai Standar	Person		88%	89%		90%		91%		92%		93%		
			Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan Nifas lengkap	Person		88%	89%		90%		91%		92%		93%		
			Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap	Person		91%	92%		93%		94%		95%		96%		
			Cakupan Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Person		50%	55%		60%		65%		70%		75%		
1.02.02.2.0 2.0047	Subk 48	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					331.343.000		364.477.300		400.925.030		441.017.533		485.119.286		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen	1	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIKES
1.02.02.2.0 2.0048	Subk 49	Pengelolaan Layanan Imunisasi					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DIKES
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Person	100	100	100		100		100		100		100		
1.02.02.2.03	K3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		48.315.300		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KETT.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
		Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Person	100		100		100		100		100		100		
			Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Unit	29	29	29		30		30		30		30		DIKES
1.02.02.2.0 3.0002	Subk 50	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		48.315.300	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		DIKES
1.02.02.2.04	K4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						220.938.794		243.032.673		267.335.941		294.069.535		323.476.488	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Persentase Rumah Sakit Kelas C/D dan Fasyankes yang Memenuhi Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan.	Person	100	100	100		100		100		100		100		
			Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Unit	31	31	31		31		32		32		32		DIKES
1.02.02.2.0 4.0003	Subk 51	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						220.938.794		243.032.673		267.335.941		294.069.535		323.476.488	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	29	29	29		29		29		29		29		DIKES
1.02.03	P2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia						540.840.000		2.059.275.000		2.127.965.000		2.199.617.000		2.274.188.000	
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Person	80%	82%	85%		90%		100%		100%		100%		DIKES + RSUD
			Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Person	0	6:1000	6:1000		6:1000		6:1000		6:1000		6:1000		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KET.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1.02.03.2.02	K5	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					133.886.104		120.597.494		120.597.494		120.597.494		120.597.494		
		Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan Strategis sesuai standar	Person	95	96	96		97		98		99		100	DIKES	
			Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan	Person	85	90	95		98		100		100		100		
1.02.03.2.02.0003	Subk 52	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					132.886.104		119.597.494		119.597.494		119.597.494		119.597.494		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1	DIKES	
			Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	Person	96.11	97	100		100		100		100		100	DIKES	
			Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	Person	78	80	100		100		100		100		100	DIKES	
	Subk 53	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	2484	2484	2484		2484		2484		2484		2484	DIKES	
1.02.03.2.03	K6	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					406.953.896		1.938.677.506		2.007.367.506		2.079.019.506		2.153.590.506		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang di Tingkatkan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	70	75	80		85		90		95		100	DIKES + RSUD	
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang di Tingkatkan Kompetensi Teknis	Orang	100	100	100		150		200		250		300	DIKES +	

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETT.	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															RSUD
1.02.03.2.0 3.0001	Subk 54	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					406.953.896		1.938.677.506		2.007.367.506		2.079.019.506		2.153.590.506		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	200		200	-	200	-	200	-	200	-		DIKES + RSUD
1.02.04	P3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					732.128.000		757.083.000		782.337.000		808.680.000		836.096.000		
		Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	80	85	88		89		90		91		92			
1.02.04.2.01	K7	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					71.283.666		83.021.779		94.794.555		107.386.706		120.776.840		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			DIKES
1.02.04.2.0 1.0001	Subk 55	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					71.283.666		83.021.779		94.794.555		107.386.706		120.776.840		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1		1		1	-	1	-	1	-	1	-		DIKES
1.02.04.2.03	K8	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					660.844.334		674.061.221		687.542.445		701.293.294		715.319.160		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN										KET.	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase	60%		70%		75%		80%		85%		90%		DIKES	
1.02.04.2.0 3.0001	Subk 56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					660.844.334		674.061.221		687.542.445		701.293.294		715.319.160		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1	DIKES	
1.02.05	P4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					315.663.000		326.423.000		337.312.000		348.670.000		360.491.000		
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	80	81	82	315.663.000	83	326.423.000	85	337.312.000	87	348.670.000	90	360.491.000	
1.02.05.2. 01	K9	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					36.130.720		38.504.752		40.756.204		43.217.530		45.874.956		
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	DIKES	
1.02.05.2.0 1.0001	Subk 57	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					36.130.720		38.504.752		40.756.204		43.217.530		45.874.956		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN										KE T.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																RS UD
		Pencapaian RS Pendidikan	Status		Terakreditasi Satelit FK UNRAM	Terakreditasi Satelit FK UNIZAR						Terakreditasi Utama FK UNIV BUMIGORA				RS UD
X.XX.01.2.01	K12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					622.257.001		678.481.781		740.028.991		807.415.876		881.210.647	
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tetap waktu dan sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	4			4		4			4		DIKES + RSUD
X.XX.01.2.01.0001	Subk60	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					120.018.416		126.019.337		132.320.304		138.936.319		145.883.135	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2			2		2			2		DIKES + RSUD
X.XX.01.2.01.0002	Subk61	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					66.274.481		72.901.929		80.192.121		88.211.334		97.032.467	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	3			3		3			3		DIKES
X.XX.01.2.01.0004	Subk62	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					41.274.481		45.401.929		49.942.121		54.936.334		60.429.967	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	3			3		3			3		DIKES
X.XX.01.2.01.0006	Subk63	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					358.184.326		394.002.759		433.403.035		476.743.338		524.417.672	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	3	3	3			3		3			3		DIKES +

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KE T.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													RSU D	
X.XX.01.2.0 1.0007	Sub k 64	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.505.298		29.155.827		32.071.410		35.278.551		38.806.406		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4		4		4		4		4	DIK ES	
X.XX.01.2.0 1.0010	Sub k 65	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1		1		1		1		1	DIK ES + RSU D	
X.XX.01.1. 02	K1 3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					205.277.132.27 4		205.326.953.623		204.449.779.856		202.875.451.55 3		200.481.381.226		
		Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	12		12		12		12		12	DIK ES	
			Persentase penyerapan anggaran perangkat daerah														
X.XX.01.2.0 2.0001	Sub k 66	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					205.241.292.853		205.287.530.260		204.406.414.156		202.827.749.283		200.428.908.729		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24094	24094	24094		24094	-	24094		-		24094	DIK ES + RSU D	
X.XX.01.2.0 2.0005	Sub k 67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					9.817.481		10.799.229		11.879.152		13.067.068		14.373.774		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	1		1	-	1		-		1	DIK ES	

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KET.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
			Kuungan Akhir Tahun SKPD														
X.XX.01.2.0 2.0007	Subk 68	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					26.021.940		28.624.134		31.486.547		34.635.202		38.098.722		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1		1		1		1		-	DIKES + RSUD	
X.XX.01.1.03	K1 4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500		8.052.550		
		Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah	Laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	1	1	1		1		1		1		1	DIKES	
			Persentase validasi data aset Perangkat Daerah														
X.XX.01.2.0 3.0005	Subk 69	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500		8.052.550		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1		1		1		1		1	DIKES	
X.XX.01.1.05	K1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					35.200.000		38.720.000		42.592.000		46.851.200		51.536.320		
		Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	Laporan	1	1	1		1		1		1		1	DIKES	
			Laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah														
X.XX.01.2.0 5.0003	Subk 70	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					24.200.000		26.620.000		29.282.000		32.210.200		35.431.220		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1	DIKES	
X.XX.01.2.0 5.0005	Subk 71	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1	DIKES	
X.XX.01.2.06	K1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					973.326.582		1.070.659.240		1.177.725.164		1.295.497.680		1.425.047.448		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIA TAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KE T.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU		TAR GET	PAGU
			didukung oleh jasa penunjang														
X.XX.01.2.0 8.0002	Sub k 77	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.430.000.000		1.573.000.000		1.730.300.000		1.903.330.000		2.093.663.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	12	12		12		12		12		12	DIK ES	
X.XX.01.2.0 8.0004	Sub k 78	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					249.543.800		274.498.180		301.947.998		332.142.798		365.357.078		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	12	12	12		12		12		12		12	DIK ES + RSU D	
X.XX.01.2. 09	K1 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.056.585		277.262.244		304.988.468		335.487.315		369.036.046		
		Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah BMD kondisi baik	Unit	1	1	1		1		1		1		1	DIK ES	
			Persentase BMD kondisi baik														
X.XX.01.2.0 9.0002	Sub k 79	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					252.056.585		277.262.244		304.988.468		335.487.315		369.036.046		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lapor an	120	120	120		120	-	120		120	-	120	DIK ES	
X.XX.01.2. 10	K1 9	Peningkatan Pelayanan BLUD					101.915.541.75 7		112.107.095.932		123.317.805.525		135.649.586.07 8		149.214.544.686		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pada BLUD	Persentase Tingkat Layanan BLUD	Perse n	100	100	100		100		100		100		100		
			Jumlah Layanan Kesehatan yang Tersedia di Puskesmas	Unit	31	31	31		31	-	31		31	-	31	DIK ES	
			Jumlah Layanan Kesehatan yang Tersedia di Labkesmas	Layan an	1	1	1		1		1		1		1	DIK ES	
			Indeks Kepuasan Masyarakat - Puskesmas	Indek s	80	81	82		84		86		88		90	DIK ES	
			Persentase Pemenuhan Instrumen Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas RSUD	Perse n	-	-	-		WBK		-		WBBM		-	RS UD	

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIR TAHUN								KET.		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
XXX.01.2.1 0.0001	Sub k 80	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					101.915.541.757		112.107.095.932		123.317.805.525		135.649.586.078		149.214.544.686		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	31	31	31		32	-	32	-	32	-	32	-	DIK ES + RSU D

Outcome Program Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUB KEGIATAN
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Untuk Semua	Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar